

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2016 sebagian

besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2016 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	>100	Biru
2.	Baik	80-100	Hijau
3.	Cukup	50-79	Kuning
4.	Kurang	<49	Merah

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (outcome).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 adalah seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. *Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI		KATEGORI
				CAPAIAN KINERJA	%	
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	a. Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	74.854,47 Ton	75.903,28 Ton	101,40	Sangat Baik
		b. Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	130.526,10 Ton	142.466,60 Ton	109,15	Sangat Baik
		c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.311 Ton	24.061,61 Ton	180,76	Sangat Baik
2.	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	104	106,66	102,56	Sangat Baik
3.	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	a. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	47,09 kg/kapita/tahun	47,09 kg/kapita/tahun	100,00	Baik
4.	Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	a. Jumlah CPIB (unit)	3 Unit	9 Unit	300,00	Sangat Baik
		b. Jumlah CBIB (unit)	45 Unit	187 Unit	415,56	Sangat Baik
		c. Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SKP (unit)	2 Unit	3 Unit	150,00	Sangat Baik
5.	Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terlevegannya pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	a. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok)	10 Kelompok	5 Kelompok	50,00	Cukup
		b. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	75 %	100 %	133,33	Sangat Baik
		c. Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	7 Kasus	5 Kasus	71,43	Cukup
6.	Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	a. Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	171.679 Hektar	171.679 Hektar	100,00	Baik
		b. Jumlah jenis yang dikonservasi (jenis)	2 Jenis	2 Jenis	100,00	Baik
7.	Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir yang rusak	a. Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Ha)	2,5 Hektar	2 Hektar	80,00	Baik

3.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala / masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka ditetapkan 14 (empat belas) sasaran yang ingin dicapai di bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2010-2015. Untuk mencapai 14 (empat belas) sasaran tersebut, dilaksanakan melalui 6 (enam) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera pada tabel di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1.

Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan

3.2.1 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Budidaya

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya dengan 18 (delapan belas) kegiatan pokok. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2016 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.3.865.223.930,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.441.738.154,- atau 89,04 %.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Kategori
		(Ton)	Capaian Kinerja (Ton)	%	
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	74.854,47	75.903,28	101,40	Sangat Baik

Dilihat dari tabel 3.2. tersebut diatas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi budidaya yang ditargetkan sebesar 74.854,47 ton mencapai 75.903,28 ton atau 101,40 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan rata-rata sebesar 10,39 % seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2012 - 2016 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	51.236,29	53.519,43	59.854,03	68.693,74	75.903,28	10,39

Dari tabel 3.3 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah produksi budidaya perikanan di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,39 % per tahun. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 10,50 %. Peningkatan produksi budidaya ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang terlaksana dengan baik melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya merupakan hasil dari adanya upaya melalui kegiatan yang pada tahun sebelumnya telah dilakukan antara lain melalui bantuan penambahan jumlah kolam baru, rehab kolam, bantuan keramba, perbaikan saluran air, dan bantuan sarana perbenihan yang dianggap meningkatkan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) menjadi 20.382 RTP di Tahun 2015 dari sebelumnya 20.351 RTP di Tahun 2014. Peningkatan jumlah RTP sebanyak 0,15% ternyata sejalan dengan kenaikan jumlah produksi perikanan budidaya dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 sebesar 13,94%. Dengan adanya peningkatan jumlah pembudidaya di tahun 2015 maka mendorong adanya

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 yang mampu mengelola perikanan budidaya sehingga meningkatkan capaian produksi perikanan budidaya di tahun 2016. Peran pembudidaya ikan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya didukung pula oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain kegiatan pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba, pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil, pengembangan budidaya ikan lokal, pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan marginal untuk pengembangan budidaya kolam, pengembangan budidaya ikan di kawasan minapolitan, pemantauan dan pengendalian obat dan bahan kimia berbahaya bagi budidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya.

Dalam suatu kegiatan tentulah terdapat kendala dan permasalahan. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah :

- (a) Perluasan kawasan budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal;
- (b) Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
- (c) Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;
- (d) Masih tingginya serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya keramba di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (e) Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian.

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang akan dilakukan untuk peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, antara lain :

- a) Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba;
- b) Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya;
- c) Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.

3.2.2 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Tangkap

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan 11 (sebelas) kegiatan pokok. Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.673.224.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 742.759.800,- atau 44,39 %.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (Ton)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (Ton)	%	
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	130.526,10	142.466,60	109,15	Sangat Baik

Dilihat dari Tabel 3.4 diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 capaian jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 142.466,60 ton atau 109,15% dari target sebesar 130.526,10 ton sehingga telah mencapai target yang sudah ditentukan. Peningkatan produksi perikanan tangkap ini merupakan hasil dari adanya upaya melalui kegiatan yang pada tahun sebelumnya telah dilakukan. Sebagai contoh produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2015 telah dilakukan berbagai kegiatan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan (alat tangkap dan kapal/ perahu), baik yang sifatnya penambahan maupun mengganti sarana prasarana nelayan yang telah rusak, diharapkan sebagai salah satu indikator penentu terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap. Berdasarkan data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah sarana kapal penangkapan sebesar 5,64% daripada Tahun 2014. Angka yang meningkat ini berbanding lurus dengan peningkatan produksi sebesar 26.517,00 Ton atau setara dengan 36,88%. Dari data tersebut berarti terdapat peningkatan sebanyak 20,43 ton/ kapal.

Apabila dibandingkan dengan capaian hasil tangkapan dari Tahun 2012-2016, maka terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi hasil tangkapan yakni sebesar 11,81 % per tahun seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2012 - 2016 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	93.265,20	105.560,80	101.016,10	130.526,10	142.466,60	11,81

Dan bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan produksi tangkap sebesar 9,15 %. Pencapaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran-1** tahun 2016 dinilai sangat baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut, Pendataan kapal perikanan, Peningkatan kapasitas sarana penangkapan ikan perairan umum daratan, Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, Monitoring evaluasi sumberdaya ikan, perairan dan kelembagaan pengelolaan SDI, Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan perairan umum daratan dan laut, Pembinaan KUB penerima PUMP-Perikanan Tangkap, Peningkatan keterampilan usaha nelayan, Pembinaan perizinan usaha perikanan tangkap, Pembuatan Kartu Nelayan, dan Pendampingan penyusunan Data Base KUB.

Yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian **IKU-2** pada **Sasaran-1** ini antara lain :

- (a) Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap diperoleh dari data survei sampel desa perikanan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau tidak berfungsi selayaknya tempat pelelangan ikan. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi keakuratan dan akuntabilitas data;
- (b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, terutama armada penangkapan ikan di perairan laut sebagian besar masih berukuran < 5 GT sehingga trip penangkapan tidak terlalu lama dan luas jangkauan nelayan melaut tidak terlalu jauh;
- (c) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya habitat ikan dan sumberdaya ikan semakin menurun karena eksploitasi berlebih terutama pada perairan umum daratan;
- (d) Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan;
- (e) Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.

3.2.3 Indikator Kinerja Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah produksi produk olahan perikanan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Daya

Saing Produk Perikanan. Sasaran dari Program tersebut, selain bertujuan untuk Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat juga bertujuan pencapaian sasaran peningkatan jumlah produksi produk olahan hasil perikanan.

Adapun capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Tabel 3.6 Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (Ton)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (Ton)	%	
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.311,00	24.061,61	180,76	Sangat Baik

Dilihat dari tabel 3.6 tersebut diketahui bahwa jumlah produk olahan hasil perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 mencapai 24.061,61 ton atau 180,76 %. Capaian ini dinilai sangat baik karena melebihi target yang ditentukan yakni 130.311,00 ton. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan. Hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang, dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Bandeng dan Udang. Namun berdasarkan data yang tercatat, produksi produk olahan justru menunjukkan trend stabil pada Tahun 2014

sebanyak 28.422,12 Ton menjadi 28.510,15 Ton pada Tahun 2015, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2012 - 2016 pada Indikator Kinerja Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	20.227,63	26.152,00	28.422,12	28.510,15	24.061,61	5,67

Jika memperhatikan selanjutnya di Tahun 2016, data menunjukkan angka 24.061,61 Ton yang berarti terjadi penurunan sebanyak 4.448,54 Ton / 15,60%. Dari sisi target 3 tahunan, yang berasal dari Renstra 2011-2015 dan ditambah Perjanjian Kinerja (PK) 2016, pencapaian terhadap target selalu mencapai di atas 100%. Perbedaan data ini dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan sumber data yang diacu dalam pengambilan data realisasi.

Keberhasilan pencapaian **IKU-3** pada **Sasaran-1** disebabkan oleh :

- Peningkatan jumlah volume produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun budidaya;
- Peningkatan jumlah UPI pengolah dan pemasar setiap tahunnya.

Yang menjadi tantangan dan kendala dalam pencapaian **IKU-3** pada **Sasaran-1** adalah :

- Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;

- (b) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah;
- (c) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.

Pencapaian kinerja **IKU-3** pada **Sasaran-1** tahun 2016 dinilai sangat baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan: pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah. Oleh karena itu untuk ke depan dalam rangka pencapaian kinerja tahun mendatang maka ditempuh strategi yang mendukung peningkatan daya saing produk perikanan di Kalimantan.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS 2.

Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

3.2.4 Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) yang nilainya didapatkan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dilakukan melalui Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya.

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja	%	
Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	104	106,66	102,56	Sangat Baik

Dari tabel 3.8 di atas dapat diketahui bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) tahun 2016 mencapai 106,66 atau 102,56 %

dari target 2016 dan melampaui target 104. Capaian kinerja ini dinilai sangat baik karena telah melampaui targetnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan pada waktu tertentu. Indikator ini dapat terjadi kenaikan ketika kenaikan produktifitas pelaku usaha perikanan diikuti pula dengan kenaikan harga produk perikanan yang mengakibatkan kenaikan nilai produksi. Dengan meningkatnya NTN di Kalimantan Tengah maka dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan meningkat, dan karena NTN Kalimantan Tengah lebih dari 100 menandakan bahwa nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan rata-rata per tahun Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) sebesar 1,36 % seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2014 - 2016 pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2014	2015	2016	
Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	102,44	103,85	106,66	1,36

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya.

NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Dilihat dari capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Kalimantan Tengah nilainya melebihi 100 yang berarti bahwa nelayan di Kalimantan Tengah memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa rata-rata nelayan di Kalimantan Tengah sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini juga didukung kegiatan peningkatan sarana penangkapan nelayan perairan laut dan perairan umum daratan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, peningkatan keterampilan usaha nelayan,

pengembangan kawasan budidaya kolam dan karamba, pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil, dan pengembangan budidaya ikan di kawasan minapolitan.

SASARAN STRATEGIS 3. **Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat**

3.2.5 Indikator Kinerja Rata-Rata Konsumsi Ikan Masyarakat

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dengan 10 (sepuluh) kegiatan pokok. Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2016 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 615.595.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 581.181.850,- atau 94,41 %.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Rata-Rata Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (kg/kapita/tahun)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (kg/kapita/tahun)	%	
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Rata-rata konsumsi ikan masyarakat	47,09	47,09	100,00	Baik

Dilihat pada Tabel 3.10, pada Tahun 2016 capaian sasaran peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat mencapai 100,00 %. Capaian kinerja ini dinilai baik karena sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Prestasi dari capaian ini disebabkan karena permintaan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sangat tinggi. Disamping nilai gizi yang terkandung dalam ikan tersebut sangat berguna bagi kesehatan, harga ikan di pasaran yang masih terjangkau apabila dibandingkan dengan harga daging yang lebih tinggi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan protein bagi keluarga, masyarakat lebih memilih ikan untuk dikonsumsi.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja pada tahun 2016 ini dengan tahun-tahun sebelumnya, indikator kinerja untuk jumlah tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 0,77 %, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11. *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2013 - 2016 pada Indikator Kinerja Rata-Rata Konsumsi Ikan Masyarakat*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2013	2014	2015	2016	
Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	46,03	46,51	46,35	47,09	0,77

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka ada peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah sebesar 1,60 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada **Sasaran Strategis-3** juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi perikanan pada **Sasaran Strategis-1**. Dengan meningkatnya produksi perikanan akan mengakibatkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat, khususnya di

Kalimantan Tengah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata konsumsi ikan masyarakat menjadi sebesar 46,35 kg/kapita/tahun di Tahun 2015, lebih tinggi daripada tingkat konsumsi ikan masyarakat tahun 2014 yang berada di angka 46,19 kg/kapita/tahun yang mana selama 4 tahun terakhir selalu menunjukkan trend kenaikan, serta selalu berada pada posisi di atas Angka Konsumsi Ikan (AKI) Nasional. Dampak dari tingginya rata-rata konsumsi ikan masyarakat ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sangat tinggi, meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang terkandung dalam daging ikan untuk kesehatan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membeli ikan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga daging.

Yang menjadi tantangan dan kendala dalam pencapaian **Sasaran-3** adalah :

- (a) Ragam produk olahan hasil perikanan yang harus dikembangkan terus agar mampu bersaing dengan produk olahan pangan lainnya, yang diharapkan dapat dipasarkan ke luar daerah bahkan mampu di ekspor ke luar negeri;
- (b) Produk hasil perikanan yang cenderung mudah rusak sehingga menyebabkan nilai ekonomisnya menurun dan isu penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap produk hasil perikanan menyebabkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk olahan tertentu;
- (c) Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga. Sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Pencapaian kinerja **Sasaran-3** tahun 2016 dinilai baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan dan peningkatan

promosi produk hasil perikanan. Oleh karena itu untuk kedepannya, diperlukan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun yang akan datang antara lain :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- (a) Peningkatan produksi di sektor perikanan penangkapan dan budidaya;
- (b) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses arus barang dan jasa dapat lancar dari kota ke desa;
- (c) Peningkatan Nilai Tambah Produk olahan perikanan di tingkat UMKM sehingga meningkatnya minat konsumen dalam mengkonsumsi ikan;
- (d) Pemberian bantuan penguatan fasilitas permodalan ke UMKM sektor Kelautan dan Perikanan;
- (e) Peningkatan kapasitas SDM yang ada di UMKM;
- (f) Peningkatan promosi, peluang investasi dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS 4.

Peningkatan Sentra-Sentra Unit Perbenihan, Budidaya, dan Unit Pengolahan

3.2.6 Indikator Kinerja Jumlah CPIB

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan unit perbenihan yang mendapatkan sertifikat mutu Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB). Untuk mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran-4** ini dilakukan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya. Capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-4** tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah CPIB Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (Unit)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (Unit)	%	
Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	Jumlah CPIB	3	9	300,00	Sangat Baik

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dari tabel 3.12. tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-4** tahun 2016 dinilai sangat baik karena telah mencapai 9 (sembilan) unit atau 300,00 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3 (tiga) unit CPIB.

Cara Pembenihan Ikan yang Baik atau CPIB merupakan sertifikasi benih dengan menggunakan standar sistem mutu perbenihan paling dasar/sederhana yang seharusnya diterapkan oleh pembenih ikan dalam memproduksi benih ikan yang bermutu, dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan, telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan SNI atau persyaratan teknis lainnya, serta memperhatikan *biosecurity*, mampu telusur (*traceability*) dan keamanan pangan (*food safety*).

Benih merupakan faktor penting dalam pemeliharaan ikan budidaya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Benih harus tersedia dalam jumlah yang cukup, berkualitas tinggi, dan tepat waktu. Penggunaan benih berkualitas merupakan salah satu jaminan keberhasilan panen. Penggunaan benih yang tidak berkualitas akan menyebabkan usaha pemeliharaan tidak ekonomis karena pemberian pakan menjadi tidak efisien,

pertumbuhan lambat dan tidak seragam, mudah terserang penyakit sehingga menyebabkan produksi dan nilai produksi rendah.

Ada 4 (empat) persyaratan untuk mendapatkan sertifikat CPIB, yaitu :

- (a) Persyaratan teknis, yang meliputi kelayakan lokasi dan sumber air serta kelayakan fasilitas;
- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- (b) Persyaratan manajemen, yaitu adanya struktur organisasi yang baik dan berjalan dengan maksimal serta mampu melakukan dokumentasi dan perekaman informasi yang berkelanjutan;
- (c) Persyaratan keamanan pangan, yaitu unit perbenihan tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan/bahan kimia/bahan biologi yang terlarang, dan menyebabkan residu, termasuk antibiotik;
- (d) Persyaratan lingkungan, yaitu unit perbenihan mampu mengolah limbah buangan air dan limbah lainnya sehingga aman untuk dibuang dan tidak merusak lingkungan.

Pada tahun 2016, unit pembenihan yang telah mendapatkan sertifikasi benih CPIB mencapai 9 (sembilan) unit. Dari kesembilan unit perbenihan tersebut, 1 (satu) unit merupakan unit perbenihan rakyat (UPR) sedangkan 8 (delapan) unit lainnya merupakan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Diharapkan dengan semakin meningkatnya unit perbenihan yang mendapatkan sertifikat CPIB maka kualitas benih yang digunakan untuk pembudidayaan ikan di Kalimantan Tengah dapat terjamin sehingga dapat menghasilkan ikan budidaya yang bermutu baik.

Data unit perbenihan yang telah mendapatkan sertifikasi mutu CPIB pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (a) CV. Mina Katune, Kota Palangka Raya dengan komoditas ikan patin;

- (b) Balai Benih Ikan Gohong, Kabupaten Pulang Pisau dengan komoditas ikan lele;
- (c) Balai Benih Ikan Trinsing, Kabupaten Barito Utara dengan komoditas ikan nila;
- (d) Balai Benih Ikan Bagendang, Kabupaten kotawaringin Timur dengan komoditas ikan jelaawat;
- (e) UPR Danau Seribu, Kabupaten Seruyan dengan komoditas ikan nila;
- (f) Balai Benih Ikan Sungai Sahara'an, Kabupaten Lamandau dengan komoditas ikan lele;
- (g) Balai Benih Udang Galah Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan komoditas udang galah;
- (h) Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan komoditas udang windu;
- (i) Balai benih Ikan Sakata Juri, Kabupaten Gunung Mas dengan komoditas ikan nila.

3.2.7 Indikator Kinerja Jumlah CBIB

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan unit budidaya ikan yang menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB). Untuk mewujudkan **IKU-2** pada **Sasaran-4** ini dilakukan melalui Program Pengembangan dan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya. Capaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran-4** tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah CBIB Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (Unit)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (Unit)	%	
Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	Jumlah CBIB	45	187	415,56	Sangat Baik

Dilihat dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk jumlah CBIB tahun 2016 melampaui target yang ditetapkan yaitu 45 unit budidaya mencapai 187 unit budidaya atau sebesar 415,56 %.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

CBIB adalah bagian dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu Hasil Perikanan yang merupakan suatu cara untuk memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta biologis sehingga produk perikanan budidaya yang aman (tidak terkontaminasi bahan-bahan berbahaya), bermutu tinggi dan diterima oleh konsumen.

Sertifikasi CBIB merupakan serangkaian kegiatan penerbitan dan pengendalian sertifikat melalui penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam Cara Budidaya Ikan Yang Baik yang diterbitkan sesuai dengan tingkatan kelulusan setelah dilakukan penilaian oleh Auditor Pusat (dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan) bersama-sama dengan Auditor yang ada di daerah.

Prinsip-prinsip dasar dalam CBIB yang menjadi acuan penilaian CBIB antara lain :

(a) *Biosecurity* (Keamanan Biologi), yaitu upaya mencegah/mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem budidaya dan mencegah penyebarannya dari satu tempat ke tempat lain yang masih bebas.

(b) *Traceability* (Mampu Telusur), yaitu upaya kita menjamin dan mempertanggungjawabkan kualitas hasil perikanan kita berdasarkan catatan serta pendataan yang rapi.

(c) *Enviromental Friendly* (Ramah lingkungan), yaitu upaya kita dalam menjalankan usaha di bidang perikanan agar selalu menjaga kebersihan, keasrian, kesehatan dan keamanan lingkungan.

Pada tahun 2016, unit budidaya ikan yang mendapatkan sertikat CBIB di Kalimantan Tengah adalah sebesar 187 unit budidaya. Hal ini dinilai sangat baik dan membuktikan bahwa unit budidaya di kalimantan Tengah telah memahami dan mengerti bahwa Cara Budidaya Ikan yang Baik sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembudidayaan sehingga dapat menghasilkan komoditas yang bermutu tinggi dan aman untuk dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Komoditas hasil budidaya ikan yang bermutu tinggi dan aman konsumsi ini pun tidak terlepas dari benih yang baik yang didapatkan dari unit oerbenihan yang menerapkan CPIB. Sehingga antara CBIB dan CPIB saling berkaitan erat untuk menentukan hasil produk budidaya perikanan yang berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, dan mampu bersaing di pasaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan.

3.2.8 Indikator Kinerja Jumlah Pengolahan Hasil Perikanan yang Memiliki SKP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan unit pengolahan hasil perikanan yang telah menerapkan sistem mutu dalam produksinya sehingga memperoleh SKP atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Untuk mewujudkan **IKU-3** pada **Sasaran-4** ini dilakukan melalui Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Capaian kinerja **IKU-3** pada **Sasaran-4** tahun 2016 adalah sebagai berikut

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 3.14 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Jumlah Pengolahan Hasil Perikanan yang Memiliki SKP Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (Unit)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (Unit)	%	
Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SKP	2	3	150,00	Sangat Baik

Dilihat dari tabel 3.14 tersebut di atas dapat diketahui bahwa **IKU-3** pada **Sasaran-4** ini dinilai sangat baik karena telah terealisasi sebesar 300,00 % pada tahun 2016. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 2 (dua) unit pengolahan, pada tahun 2016 telah tercapai sebanyak 3 (tiga) unit pengolahan yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan atau SKP.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 20 ayat (3) bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan dan pengolahan ikan wajib memenuhi

dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Sertifikasi kelayakan pengolahan merupakan upaya dalam menjamin bahwa suatu Unit yang melakukan pengolahan maupun penyimpanan telah memenuhi kelayakan dasar sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang baik dan sesuai permintaan pasar, terjamin keamanannya pada saat dikonsumsi, serta mampu meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun Internasional. Penerbitan SKP ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah UPI mengajukan permohonan SKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai hasil pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik skala besar maupun skala UKM (Usaha Kecil Menengah) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practise/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP) dan telah menjalani serangkaian prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur penerbitan SKP tersebut adalah sebagai berikut :



Sumber : Ditjen. PDSPKP – KKP RI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan penerbitan SKP adalah sebagai berikut :

- Setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- Ruang Lingkup SKP meliputi tempat/unit yang melakukan pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan;
- SKP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda;
- Memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (orang) penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- Untuk memperoleh SKP maka UPI harus:

- Memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur atau Bupati;
 - Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Memiliki Akta Notaris Pendirian perusahaan di bidang pengolahan (SIUP) oleh KKP, Gubernur, Bupati/ Walikota (bagi badan usaha);
 - Memiliki dan menerapkan Program Persyaratan Dasar seperti : Prosedur Operasional Standard Sanitasi (POSS) dan Cara Pengolahan Yang Baik (CPB), secara konsisten sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi;
 - Melakukan proses produksi secara aktif, minimal 12 hari kerja dalam satu bulan.
- # DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kalimantan Tengah yang telah memiliki SKP pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) UPI dengan total SKP yang dimiliki sebanyak 6 (enam) SKP, yaitu :

- (a) Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Sarirasa “Sarifah Salmah” di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 (tiga) SKP;
- (b) Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Salbiah Abuk di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 1 (satu) SKP;
- (c) PD. Jaya Sakti di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 2 (dua) SKP.

Capaian pada tahun 2016 ini merupakan capaian yang dinilai sangat baik. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah harus terus melakukan pembinaan mutu kepada UPI yang telah mendapatkan SKP ini dan

meningkatkan pembinaan kepada UPI yang belum mendapatkan SKP sehingga pada tahun selanjutnya UPI-UI yang belum mendapatkan SKP dapat memperoleh SKP dan meningkatkan mutu olahan hasil perikanannya. Hal ini pun tidak terlepas dari campur tangan pemerintah untuk membantu meningkatkan kemampuan pengolahan UPI yang ada di Kalimantan Tengah sehingga dapat menghasilkan produk olahan hasil perikanan yang bermutu dan mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ketiga Indikator Kinerja Utama pada **Sasaran Strategis-4** ini saling berkaitan satu dengan yang lain dan saling mendukung untuk mencapai kualitas hasil perikanan yang bermutu baik. Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, unit budidaya, dan unit pengolahan memiliki dampak terhadap kualitas produksi perikanan terutama pada produksi perikanan budidaya dan pengolahan. Dengan meningkatnya unit perbenihan yang mendapatkan sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) maka kualitas benih yang digunakan untuk pembudidayaan ikan di Kalimantan Tengah dapat terjamin. Kualitas benih yang terjamin akan menghasilkan ikan budidaya yang bermutu baik. Ikan yang bermutu baik akan menghasilkan produk olahan yang bermutu baik. Apabila kualitas benih, kualitas ikan budidaya, dan kualitas produk olahan menjadi baik maka akan meningkatkan daya jualnya dan meningkatkan pendapatan petani perikanan.

SASARAN STRATEGIS 5.

Terwujudnya Kedaulatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Serta Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif

3.2.9 Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Menerima Bantuan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah POKMASWAS yang menerima bantuan. Untuk mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini dilakukan melalui Program Pengawasan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Manfaat Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dari 5 (lima) kegiatan pada program tersebut, yang mendukung **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini adalah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-5** tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Menerima Bantuan Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja	%	
Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok)	10	5	50,00	Cukup

Dilihat dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10 kelompok namun capaian kinerja ini dinilai baik karena mencapai 5 (lima) kelompok atau 50,00 %.

POKMASWAS yang menerima bantuan ini didasarkan pada jumlah proposal bantuan yang masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2016, proposal yang masuk sebanyak 5 (lima) dokumen dari 5 (lima) kelompok sebagai berikut :

Tabel 3.16 *Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Penerima Bantuan pada Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

NO.	POKMASWAS	KETUA	LOKASI
1.	GARDA PESISIR	Surya Efendi	Desa Ujung Pandaran, Kec. Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur
2.	PANTAI INDAH	Basri	Desa Kubu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
3.	KATIMPUN SUMBER LESTARI	Darwanto	Desa Katimpun, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas
4.	MINA LESTARI	Johansyah	Desa Tanjung Rangas, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan
5.	IKAN KAHAYAN		Desa Buntoi, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau

Bantuan yang diberikan kepada 5 (lima) kelompok ini berupa perlengkapan POKMASWAS masing-masing kelompok mendapatkan bantuan 4 (empat) unit perlengkapan, yaitu HP

Android Berkamera “Samsung J1 Ace”, Senter, Senter Penetrasi “Bai Chuan Swat Flashlight”; dan Rompi Pengawas.

POKMASWAS berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Pengawasan, pemantauan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal yang berupa : penyetruman ikan, peracunan ikan (potas), penggunaan alat tangkap terlarang, budidaya/keramba yang terlalu banyak, dan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan/danau. Untuk itu, melalui bantuan yang diberikan ini diharapkan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan

pemantauan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan illegal.

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas yang bertugas melaksanakan pengawasan dan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

pemantauan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Dengan pemberian bantuan kepada POKMASWAS maka berdampak antara lain :

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan illegal.
- b. Meningkatkan pemantauan terhadap perairan di Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Kalimantan Tengah.
- d. Sumberdaya kelautan dan perikanan dapat terjaga kelestariaannya.
- e. Berkurangnya pelanggaran atau kegiatan yang merusak kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada. Ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah kasus yang terjadi di tahun 2016 menjadi 5 (lima) kasus dibandingkan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015, ada 15 kasus.
- f. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan berkeadilan.

3.2.10 Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran ≥ 10 GT. Untuk mewujudkan **IKU-2** pada **Sasaran-5** ini dilakukan melalui Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dari 5 (lima) kegiatan pada program tersebut, yang mendukung **IKU-2** pada **Sasaran-5** ini adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan. Capaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran-5** tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (%)	%	
Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	75,00	100,00	133,33	Sangat Baik

Capaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran-5** ini dinilai sangat baik karena persentase kepatuhan pelaku usaha mencapai kinerja sebesar 100,00 % atau terealisasi sebesar 133,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 75,00 %. Dari 17 kapal yang terdata, kesemuanya telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah. Data kapal tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Kepatuhan pelaku usaha ini merupakan hal yang sangat baik, melihat persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mencapai 100,00 % dari target yang ditetapkan sebesar 75,00 %. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan ini sangat tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan berkeadilan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kepemilikan izin usaha perikanan tangkap, antara lain :

- (a) Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku;
- (b) Aparat pelaksana atau penegak hukum yang dapat mengayomi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku;
- (c) Kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk menaati peraturan yang berlaku;
- (d) Sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses perizinan tidak memakan waktu panjang;
- (e) Dana yang memadai sesuai aturan yang berlaku dan tidak dirasa terlalu berat bagi pelaku usaha.

Dalam mewujudkan **IKU-2** pada **Sasaran-5** ini agar dapat berkelanjutan dan meningkat pada tahun berikutnya maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Pendataan kapal nelayan;
- (b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- (c) Pendampingan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha perikanan tangkap maupun yang belum.

3.2.11 Indikator Kinerja Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah kasus *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang ditangani dan bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga tidak merusak sumberdaya kelautan dan perikanan serta terjaga ekosistemnya. Untuk mewujudkan **IKU-3** pada **Sasaran-5** tersebut dilaksanakan melalui Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan peningkatan upaya penagakkan hukum bidang kelautan dan perikanan, dan kegiatan forum koordinasi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. Capaian kinerja **IKU-3** pada **Sasaran-5** tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (Kasus)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (Kasus)	%	
Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	7	5	71,43	Cukup

Capaian kinerja pada tahun 2016 terealisasi sebesar 71,43 % atau sebanyak 5 (lima) kasus dari target yang ditetapkan yaitu

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

sebesar 7 (tujuh) kasus. Capaian kinerja di tahun 2016 ini dinilai cukup, walaupun pada pelaksanaannya jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2016 adalah sebanyak 5 (lima) kasus saja dan semuanya telah diselesaikan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah dengan masyarakat untuk dapat menyelesaikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.

Adapun kasus yang terjadi di perairan Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 *Jenis Pelanggaran/Kasus Bidang Perikanan Yang Terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

No.	Nama Kasus	Wilayah/Posisi Kasus
1.	Penggunaan alat tangkap yang dilarang (Stroom)	DAS Kapuas
2.	Penggunaan alat tangkap yang dilarang (Stroom)	DAS Seruyan
3.	Penggunaan alat tangkap yang dilarang (Stroom)	Perairan Lamandau
4.	Penggunaan alat tangkap yang dilarang (Jenis Lampara)	Perairan Kobar
5.	Penggunaan alat tangkap yang dilarang (Jenis Lampara)	Perairan Kobar

Upaya penurunan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016, salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) bertujuan untuk :

- meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan menurunkan tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk ekosistem danau dan perairan umum lainnya),
- menguatnya kelembagaan pengawasan di daerah,
- terciptanya pengawasan mandiri oleh POKMASWAS di daerah,
- terjalannya koordinasi pengawasan secara terpadu (PPNS Perikanan, Polisi, TNI-AL, dan Masyarakat), dan
- lestarnya ekosistem perairan (danau) dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan SISWASMAS melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Berdasarkan data pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk sampai dengan Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20 *Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2016*

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS (Kelompok)
1.	Pulang Pisau	22
2.	Kotawaringin Barat	19
3.	Kapuas	5
4.	Katingan	19
5.	Kotawaringin Timur	6
6.	Barito Timur	2
7.	Palangka Raya	2
8.	Barito Utara	8
9.	Sukamara	6
10.	Gunung Mas	1
11.	Seruyan	6
12.	Barito Selatan	0
13.	Lamandau	0
14.	Murung Raya	0
	Jumlah	96

Melihat jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk yaitu mencapai 96 kelompok, tentunya diharapkan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran atau kegiatan yang merusak kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. Dalam hal penanganan tindak pidana perikanan masih memerlukan perhatian yang lebih besar dan dukungan serta koordinasi dari aparat dan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan banyaknya kasus tindak pidana pelanggaran bidang perikanan yang terjadi dari Tahun 2012 - 2016, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21. *Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2016*

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan Rata-Rata (%)
Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan	3 Kasus	7 Kasus	8 Kasus	15 Kasus	5 Kasus	42,11

Jika dilihat pada Tabel 3.21 pada Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 10 (sepuluh) kasus (66,67 %) dari Tahun 2015 tetapi apabila dilihat dari kenaikan rata-rata kasus setiap tahun sebesar 42,11 %. Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, disebabkan oleh :

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
- Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Pencapaian kinerja **IKU-3** pada **Sasaran-5** dinilai cukup, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan dan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu untuk ke depan dalam rangka pencapaian kinerja tahun mendatang maka ditempuh strategi yang mendukung Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- a) Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral);
- b) Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda);
- c) Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- d) Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada;
- e) Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS 6.

Meningkatkan Kawasan Konservasi Perairan dan Jenis yang Dikelola Secara Berkelanjutan

3.2.12 Indikator Kinerja Luas Kawasan Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan luas kawasan yang dikelola secara berkelanjutan agar dapat mewujudkan pemanfaatan wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan. Untuk mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran-6** ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Pesisir.

Capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-6** tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Luas Kawasan Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja	%	
Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	171.679	171.679	100,00	Baik

Pada tahun 2016, capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-6** mencapai 100,00 % atau sama dengan target yang ditetapkan sebesar 171.679 hektar sehingga capaian ini dinilai baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007, Kawasan Konservasi Perairan (disingkat: KKP) merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Di Kalimantan Tengah, kawasan konservasi perairan ini berada di Teluk Sanggora, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan perairan yang berkelanjutan ini maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi WP3K Provinsi Kalimantan Tengah dan kegiatan pencadangan kawasan konservasi perairan darat dan laut.

3.2.13 Indikator Kinerja Jumlah Jenis yang Dikonsumsi

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah jenis komunitas perairan (ikan) yang dikonsumsi untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan. Dalam

rangka mewujudkan **IKU-2** pada **Sasaran-6** ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Pesisir.

Capaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran-6** tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Jenis yang Dikonsumsi Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja	%	
Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	Jumlah jenis yang dikonsumsi (jenis)	2	2	100,00	Baik

Berdasarkan tabel 3.22 tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi **IKU-2** pada **Sasaran-6** tahun 2016 ini tercapai sebesar 100,00 % atau sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) jenis. Jenis ikan yang dikonsumsi tahun 2016 ini adalah Ikan Dugong dan Penyu yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui konsumsi yang dilakukan ini diharapkan dapat melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan yang dikonsumsi agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan konservasi di Kalimantan Tengah.

Melihat berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 dalam upaya peningkatan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan, baik sumber pendanaannya melalui APBD maupun APBN, mendapat perhatian yang sangat besar. Hal ini

dikarenakan program pemerintah daerah selalu mendapat dukungan dari program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dari segi penganggaran maupun kebijakan, sehingga terjadi sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pencapaian kinerja **IKU-2 Sasaran-6** dinilai Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis, pendayagunaan pesisir dan lautan, pelayanan usaha dan pemberdayaan usaha masyarakat dan penataan kawasan wilayah pesisir. Oleh karena itu untuk kedepannya strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya laut dan pesisir berbasis masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan terus meningkatkan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun melalui APBN.

Dengan meningkatnya kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan pada **Sasaran Strategis-6** ini berdampak terhadap lingkungan antara lain :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.
- b. Sumberdaya ikan dapat terlindungi dan dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.
- c. Menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan yang dikonservasi.
- d. Menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan konservasi Kalimantan Tengah.

SASARAN STRATEGIS 7. Meningkatkan Pengelolaan dan Memperbaiki Wilayah Pesisir yang Rusak

3.2.14 Indikator Kinerja Luas Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali melalui kegiatan-kegiatan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan pesisir. Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Pesisir.

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Luas Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (Hektar)	Realisasi		Kategori
			Capaian Kinerja (Hektar)	%	
Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir yang rusak	Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali	2,5	2	80,00	Baik

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 2 (dua) hektar atau 80,00 % tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,5 hektar kawasan pesisir.

Untuk mencapai **Sasaran-7** ini dilakukan melalui kegiatan penataan kawasan wilayah pesisir, yaitu dengan melakukan penanaman mangrove di 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Penanaman mangrove di

kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan di Sungai bakau dan Teluk Bogam. Sedangkan di Kabupaten Sukamara dilakukan di Sungai Tabuk.

Mangrove sendiri merupakan tanaman yang berperan penting dan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitarnya terutama bagi penduduk di kawasan pesisir. Mangrove atau hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di daerah rawa berair payau yang berada di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut atau daerah pantai dan sekitar muara sungai. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhan yang hidup di hutan mangrove memiliki keunikan karena mampu hidup di darat dan laut.

Ada beberapa manfaat hutan bakau atau mangrove antara lain :

- (a) Mencegah intrusi air laut agar air tanah tidak menjadi payau sehingga dapat dikonsumsi;
- (b) Mencegah erosi dan abrasi pantai;
- (c) Sebagai pencegah dan penyaring alami dari penguraian limbah organik yang sampai ke wilayah pesisir;
- (d) Sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, juga beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting dan siput.

Capaian kinerja pada **Sasaran-7** ini dinilai baik karena adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kalimantan Tengah demi mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja seperti tersebut diatas, melainkan juga menyajikan informasi relevan lainnya agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja sesuai dengan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, dimana sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor riil yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan yang didukung oleh tingkat produksi dan sarana/prasarana serta kualitas sumber daya manusia yang memadai.

3.3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan Misi dan Visi

Demi terwujudnya masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pemberdayaan sumberdaya manusia, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya maka strategi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan pada 5 kebijakan yang dijabarkan kedalam 7 Program Utama dan 55 Kegiatan Utama sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis 2010-2015, artinya terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan tujuan misi dan misi yang telah ditetapkan.

Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan sebesar 100,00 % dinyatakan telah berhasil dalam upaya pencapaian tujuan akhir pelaksanaan program dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

perikanan umumnya. Gambaran tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.1 *Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Tujuan Misi dan Visi Tahun 2016*

3.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran

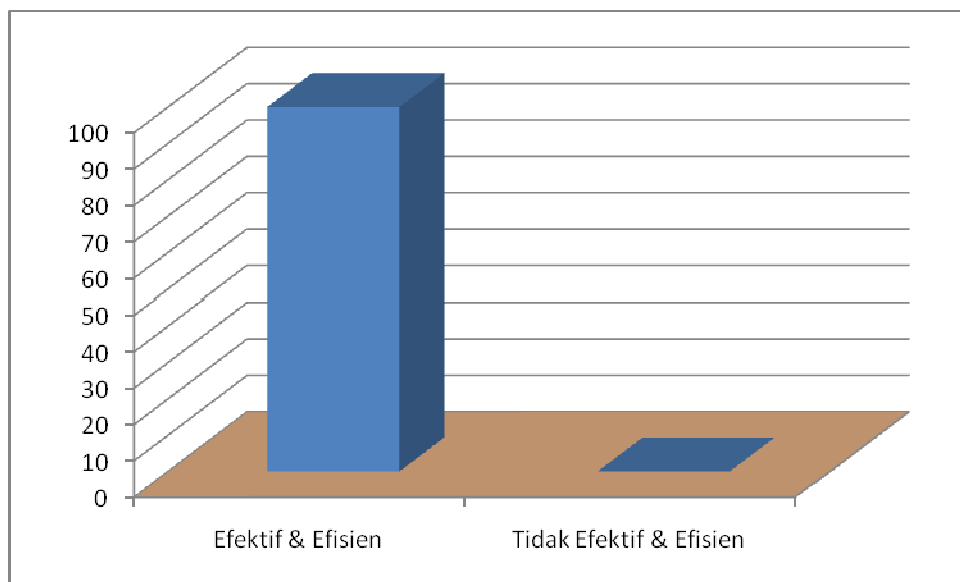
Setiap kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam perumusan pencapaian indikator kinerja kegiatan harus diarahkan dan selaras dengan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang dapat dicapai pada Tahun 2016 melalui Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan berhasil sebesar 100,00 % dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan tersebut diukur melalui indikator sasaran sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.24 *Perbandingan Indikator Pencapaian dari Target terhadap Realisasi Tahun 2016*

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2016	%
1.	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	74.854,47 ton	75.903,28 ton	101,40
2.	Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	130.526,10 ton	142.466,60 ton	109,15
3.	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.311 ton	24.061,61 ton	180,76
4.	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	104	106,66	102,56
5.	Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	47,09	47,09	100,00
6.	Jumlah CPIB (unit)	3 unit	9 unit	300,00
7.	Jumlah CBIB (unit)	45 unit	187 unit	415,56
8.	Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SKP (unit)	2 unit	3 unit	150,00
9.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok)	10 kelompok	5 kelompok	50,00
10.	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	75 %	100 %	133,33
11.	Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	7 kasus	5 kasus	71,43
12.	Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	171.679 hektar	171.679 hektar	100,00
13.	Jumlah jenis yang dikonservasi (jenis)	2 jenis	2 jenis	100,00
14.	Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Ha)	2,5 hektar	2 hektar	80,00

Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan bahwa **55** kegiatan (**100,00 %**) yang efektif terutama dalam mewujudkan sasaran juga sangat efisien dalam penggunaan input

untuk menghasilkan output sesuai yang direncanakan. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana pada grafik 3.2 berikut ini :



Grafik 3.2 *Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2016*
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 3.25 *Kegiatan Yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama-sama Efisien Dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2016*

No	Nama Kegiatan	Sasaran strategis yang kurang dapat diwujudkan
--	--	--

Tabel 3.26 *Kegiatan Yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien Dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2016*

No	Nama Kegiatan	Sasaran Strategis yang Kurang Dapat Diwujudkan
--	--	--

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun apabila ditinjau dari pencapaian indikator sasaran Tahun 2016 masih belum sepenuhnya dapat tercapai. Hal tersebut dapat dikatakan

ketidaksesuaian aplikasi kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya dilaksanakan untuk menunjang pencapaian keseluruhan sasaran sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain diukur dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, juga diukur dari pengalokasian dan pemanfaatan anggarannya yang tepat sasaran. Dimana mestinya dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pelaksanaan kegiatan/ program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah maka telah dialokasikan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jumlah anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 untuk Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian strategis semula berjumlah Rp. 11.106.452.500,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp. 6.169.144.830,- atau ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.179.409.500 (37,63 %). Realisasi anggaran pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 6.169.144.830,- (89,06%). Secara rinci jumlah alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.27 berikut ini :

Tabel 3.27. *Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	a. Jumlah Produksi Budidaya (Ton) b. Jumlah Produksi Tangkap (Ton) c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	9.048.452.500	5.667.043.000	5.046.089.874	89,04
2.	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)				
3.	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	a. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)				
4.	Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan hasil perikanan yang memiliki SK (unit)	a. Jumlah CPIB (unit) b. Jumlah CBIB (unit) c. Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SK (unit)				
5.	Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	a. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok) b. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) c. Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	758.000.000	471.800.000	467.036.000	98,99

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
6.	Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	a. Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) b. Jumlah jenis yang dikonservasi (jenis)	1.300.000.000	788.200.000	656.018.956	83,23
7.	Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir yang rusak	a. Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Ha)				
TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS			11.106.452.500	6.927.043.000	6.169.144.830	89,06

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 telah terlaksana dengan baik walaupun pada tahun 2016 terjadi rasionalisasi anggaran. Secara fisik, seluruh kegiatan telah terealisasi 100 % walaupun realisasi anggarannya hanya sebesar 89,06 %. Anggaran tersebut terbagi untuk beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

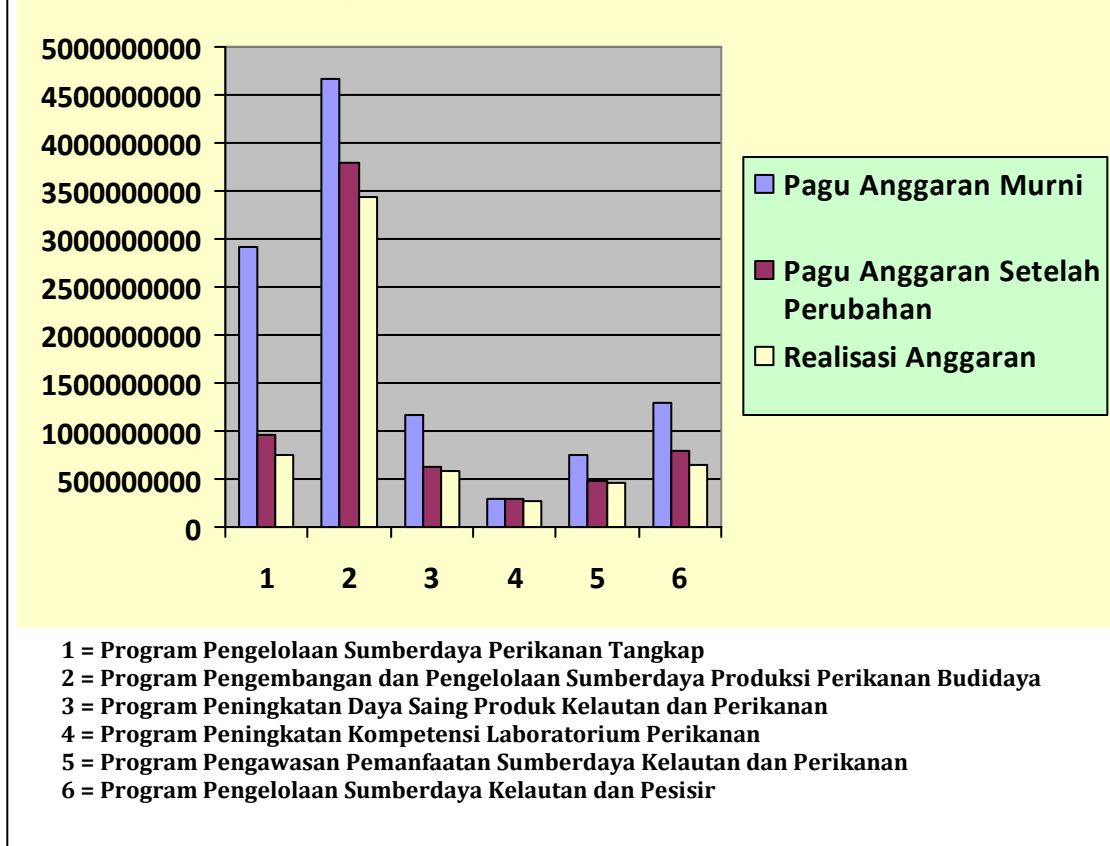
Pencapaian **Sasaran Strategis-1, 2, 3, dan 4** didukung dari anggaran pada 4 (empat) program, yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap (Rp 968.224.070,-), Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya (Rp 3.795.223.930,-), Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Rp 615.595.000,-), dan Program Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan (Rp 288.000.000,-). Keempat program ini saling mendukung dan melengkapi dalam pencapaian sasaran strategis. Anggaran pada keempat program ini terealisasi sebesar Rp 5.046.089.874,- (89,04 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Pencapaian **Sasaran Strategis-5** didukung dari anggaran pada Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 471.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 467.036.000,- (98,99 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Pencapaian **Sasaran Strategis-6** dan **7** didukung dari anggaran pada Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir sebesar Rp 788.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 656.018.956,- (83,23 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

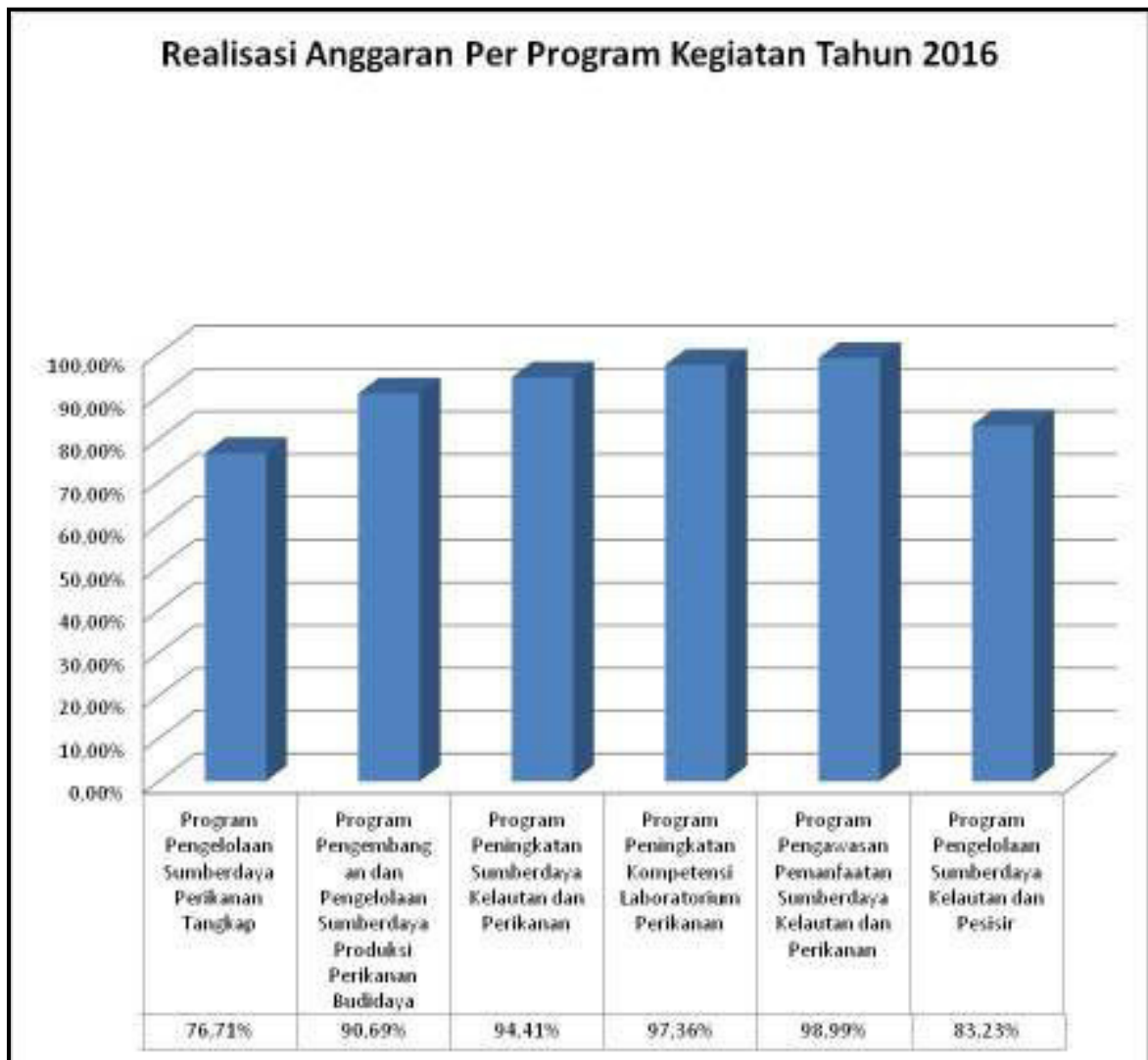
Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran di tahun 2016 per programnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Grafik 3.3 *Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2016*

Sedangkan perbandingan persentase realisasi anggaran per program kegiatannya dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Grafik 3.4 *Perbandingan Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2016*

Perkembangan daya serap keuangan per triwulan untuk Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut ini :

Tabel 3.28. *Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	a. Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	74.854,47 Ton	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	2.922.334.500	968.224.070	155.625.550	236.221.900	362.141.200	742.759.800
		b. Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	130.526,10 Ton	- Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut	1.009.342.500	2.860.000	-	2.860.000	2.860.000	2.860.000
		c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.311 Ton							
2.	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	104	- Pendataan Kapal Perikanan	700.000.000	150.572.500	5.336.000	5.336.000	5.336.000	114.917.000
3.	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	a. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	47,09 kg/kapita/tahun	- Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	150.000.000	101.799.570	10.393.000	19.963.000	43.128.000	77.978.000
4.	Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	a. Jumlah CPIB (unit)	3 Unit							
		b. Jumlah CBIB (unit)	45 Unit							
		c. Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SKP (unit)	2 Unit	- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut	200.000.000	100.000.000	-	25.020.000	96.889.300	96.889.300
				- Pembinaan KUB Penerima PUMP-Perikanan Tangkap	400.000.000	274.877.000	129.184.050	166.085.400	166.085.400	238.189.400
				- Peningkatan Keterampilan Usaha Nelayan	90.992.000	66.115.000	-	-	-	61.262.000
				- Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	122.000.000	97.000.000	-	-	-	59.066.600

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				- Pembuatan Kartu Nelayan	150.000.000	110.000.000	6.880.000	13.125.000	34.550.000	53.095.000
				Pendampingan Penyusunan Data Base KUB	100.000.000	65.000.000	3.832.500	3.832.500	13.292.500	38.502.500
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	4.663.624.500	3.795.223.930	123.676.500	646.900.730	1.252.193.610	3.441.738.154
				- Pengembangan dan Sertifikasi CBIB	45.000.000	2.320.000	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000
				- Pengembangan kawasan budidaya kolam dan karamba	600.000.000	567.615.000	-	1.920.000	213.173.000	519.030.000
				- Gerakan Mandiri Pakan	300.000.000	287.000.000	7.435.000	47.753.000	114.730.000	257.168.000
				- Pemantauan dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	140.000.000	31.125.400	-	-	14.746.000	29.786.000
				- Peningkatan sarana dan prasarana serta operasional BBIP Ujung Pandaran	419.484.500	441.661.500	43.445.700	126.619.335	180.188.098	431.246.086
				- Peningkatan sarana dan prasarana serta operasional BBIS Talohen	398.628.000	330.878.000	6.065.000	85.537.640	121.738.364	312.746.996
				- Peningkatan sarana dan prasarana serta operasional BBUG Kumai	205.465.000	190.465.000	19.229.300	65.063.685	108.771.456	167.751.284
				- Peningkatan sarana dan prasarana serta operasional SPIL Tangkiling	559.991.000	387.868.980	21.546.500	138.231.370	256.565.992	362.280.488

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	450.000.000	421.545.000	4.940.000	7.680.000	17.927.500	351.122.500
				- Pengembangan Budidaya Ikan Lokal	210.000.000	180.655.000	-	15.450.000	51.412.000	139.298.400
				- Pengembangan dan Peningkatan Mutu UPTD/UPR	135.000.000	32.968.000	2.570.000	5.270.000	11.769.500	30.825.000
				- Pengembangan Budidaya Ikan di Kawasan Minapolitan	400.000.000	338.000.000	6.920.000	8.210.000	8.950.000	284.635.800
				- Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	56.000.000	26.000.000	6.450.000	16.150.000	16.150.000	22.393.600
				- Pemantauan dan Pengendalian Obat dan Bahan Kimia Berbahaya Bagi Budidaya Ikan	120.000.000	1.182.050	-	-	726.000	726.000
				- Inventarisasi Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan	95.000.000	65.000.000	5.075.000	15.230.000	21.560.000	55.415.000
				- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	529.056.000	495.940.000	-	112.385.700	112.385.700	475.913.000
				Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.174.493.500	615.595.000	90.971.000	229.170.750	325.690.250	581.181.850
				- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	90.000.000	61.400.000	-	5.075.000	23.130.000	54.245.000
				- Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)	75.000.000	5.000.000	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

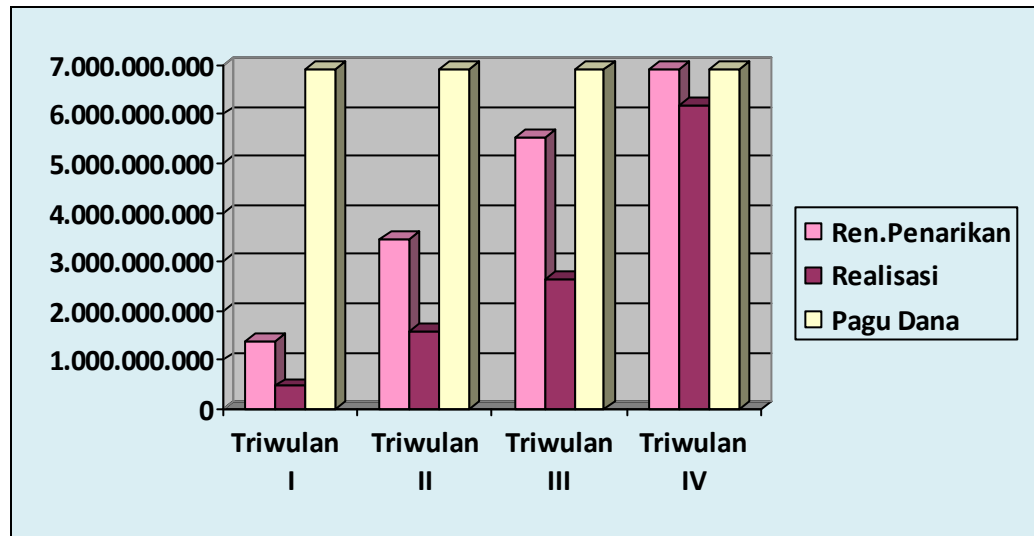
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				- Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	292.618.500	13.920.000	13.920.000	13.920.000	13.920.000	13.920.000
				- Pembinaan dan Evaluasi Unit Pengolahan Hasil Perikanan	75.000.000	66.200.000	9.300.000	17.870.000	36.097.000	65.793.600
				- Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan	117.000.000	117.000.000	-	-	-	111.690.000
				- Pameran dan promosi produk perikanan	200.000.000	149.800.000	-	82.645.000	105.947.500	142.702.500
				- Fasilitas pembinaan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan	90.000.000	36.500.000	11.410.000	30.285.000	30.285.000	30.285.000
				- Operasi Pasar	68.335.000	68.335.000	1.950.000	1.950.000	30.035.000	66.335.000
				- Ragam Produk Olahan Bernilai Tambah	80.500.000	63.000.000	48.991.000	62.091.000	62.091.000	62.091.000
				- Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan	86.000.000	34.400.000	5.400.000	15.334.750	24.184.750	34.119.750
				Program Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan	288.000.000	288.000.000	29.460.000	190.910.000	266.891.070	280.410.070
				- Peningkatan dan pengembangan SDM tenaga analis	45.000.000	45.000.000	-	-	41.051.070	41.051.070
				- Rehab Kantor LPPMHP-PIL	125.000.000	125.000.000	-	123.750.000	123.750.000	123.750.000
				- Sampling dan Pengujian Kualitas air	55.000.000	55.000.000	15.940.000	33.140.000	49.565.000	55.000.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				- Sampling dan Pengujian mutu produk hasil perikanan	63.000.000	63.000.000	13.520.000	34.020.000	52.525.000	60.609.000
TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN 1, 2, 3 DAN 4					9.048.452.500	5.667.043.000	399.733.050	1.303.203.380	2.206.916.130	5.046.089.874
5.	Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	a. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok) b. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) c. Jumlah penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	10 Kelompok 75 % 7 Kasus	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK) - Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	758.000.000 153.000.000 100.000.000 225.000.000	471.800.000 120.000.000 57.050.000 160.800.000	56.700.000 - 6.000.000 45.200.000	159.585.000 - 31.630.000 101.815.000	217.407.000 1.600.000 54.150.000 116.290.000	467.036.000 116.500.000 56.575.000 160.160.000
				Peningkatan Upaya Pengawasan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	180.000.000	103.100.000	2.500.000	11.900.000	16.407.000	103.091.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				- Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan	100.000.000	30.850.000	3.000.000	14.240.000	28.960.000	30.710.000
TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN 5					758.000.000	471.800.000	56.700.000	159.585.000	217.407.000	467.036.000
6.	Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	a. Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) b. Jumlah jenis yang dikonservasi (jenis)	171.679 Hektar 2 Jenis	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir - Penyusunan Rencana Penataan Perairan Pesisir dan Zonasi WP3K Provinsi Kalimantan Tengah	1.300.000.000 980.000.000	788.200.000 634.000.000	14.645.950 2.500.000	118.657.950 23.500.000	222.965.459 127.807.509	656.018.956 523.616.006
7.	Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir yang rusak	a. Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Ha)	2,5 Hektar	- Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Darat dan Laut - Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	200.000.000 180.000.000	74.200.000 80.000.000	3.020.000 9.125.950	15.930.000 79.227.950	15.930.000 79.227.950	53.175.000 79.227.950
TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN 6 DAN 7					1.300.000.000	788.200.000	14.645.950	118.657.950	222.965.459	656.018.956



Grafik 3.5 *Perkembangan Daya Serap Anggaran Belanja Per Triwulan*

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Grafik 3.5 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan daya serap anggaran belanja Triwulan I sampai Triwulan IV cukup signifikan, terutama kenaikan pada Triwulan I ke Triwulan III. Pada Triwulan ke IV (akhir periode perencanaan) daya serap keuangan tidak mencapai 100%. Tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 disebabkan oleh : (a) Kelebihan belanja langsung (gaji, dan sebagainya), (b) Kelebihan pengadaan barang/jasa (lelang), dan (c) Kelebihan hasil kegiatan yang tidak terealisasi. Walaupun demikian, secara umum pelaksanaan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 dianggap telah sebagian besar memenuhi prinsip hemat, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan masa transisi peralihan kepemimpinan dari Pejabat Sementara Gubernur Kalimantan Tengah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Definitif. Untuk itu, pada tahun 2016 ini kegiatan-kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan acuan berdasarkan visi misi pemimpin sebelumnya. Berdasarkan kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dan tantangan yang dihadapi dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan dan amanat pembangunan yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam memimpin Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi “Meneruskan Dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah Agar Rakyat Lebih Sejahtera Dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk menjabarkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi dan dari ketujuh misi tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan misi kelima yaitu “Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Saling Bersinergi dan Berkelanjutan”.

Guna merealisasikan visi dan misi yang dimaksud, terdapat 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- (1) mengembangkan dan memperkuat usaha perikanan budidaya yang berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan serta berwawasan lingkungan, (2) memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis ekonomi kerakyatan, (3) mengembangkan dan memperkuat sentra-sentra pengolahan serta pemasaran hasil, (4) memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta penanggulangan, dan (5) mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan kawasan pesisir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka visi, misi, tujuan, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan perjanjian kinerja 2016 ditetapkan sebagai berikut :

2.1 Rencana Strategis Tahun 2010-2015

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Elemen Rencana Strategik tersebut sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Adapun Visi yang ingin diwujudkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 adalah: **“Menjadikan Usaha Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah”**. Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Misinya sebagai berikut :

- a. **Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah Secara Berkelanjutan**

Tujuan Misi ini adalah :

- Meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut dan wilayah pesisir;
- Meningkatkan kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Provinsi (%);
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

b. Mengembangkan Perikanan Budidaya Berbasis Ekosistem Spesifik Lokal

Tujuan Misi ini adalah :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perikanan budidaya;
- Terpenuhinya kebutuhan benih ikan untuk budidaya, baik kualitas dan kuantitas;
- Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD.

c. Mengoptimalkan Usaha Perikanan Tangkap Yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Tujuan Misi ini adalah :

- Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap.

d. Mengembangkan Produk Hasil Perikanan Yang Memiliki Daya Saing Di Pasar Nasional dan Internasional

Tujuan Misi ini adalah :

- Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan nilai tambah produk perikanan;
- Terlaksananya operasional Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Palangka Raya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2010-2015, yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap untuk peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan;
- b. Meningkat dan terpenuhinya serta kebutuhan konsumsi ikan masyarakat;
- c. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan sehingga dapat bersaing, baik dipasar dalam negeri maupun internasional;
- d. Terpenuhinya kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya, baik kualitas maupun kuantitas;
- e. Terjaga dan pulihnya sumber daya perairan laut dan sumber daya perairan umum daratan;
- f. Meningkatnya usaha dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir;
- g. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan;
- h. Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dan PAD.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010-2015 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2016, antara lain meliputi :

- a. Meningkatnya volume produksi perikanan tangkap menjadi 130.526,1 ton, produksi perikanan budidaya menjadi 74.854,47 ton, jumlah produk olahan hasil perikanan menjadi 13.311 ton;
- b. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 104;
- c. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat menjadi 47,09 kg per kapita per tahun;
- d. Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan menjadi 3 unit CPIB, unit budidaya menjadi 45 unit CBIB, dan unit pengolahan yang memiliki SKP menjadi 2 unit pengolahan hasil perikanan;
- e. Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif melalui jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan menjadi 10 kelompok, persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi 75 %, dan jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu menjadi 7 kasus;
- f. Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan dengan luas kawasan 171.679 hektar dengan jumlah jenis yang dikonservasi menjadi 2 jenis.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir dan rusak agar pulih kembali menjadi 2,5 hektar.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

A. Strategi

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan adalah :

- a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan budidaya;
- b. Melakukan peningkatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap yang berbasis pada pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab;
- c. Meningkatkan daya saing produk hasil kelautan perikanan;
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat.

B. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah adalah :

- a. Mengembangkan dan memperkuat usaha perikanan budidaya yang berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan serta berwawasan lingkungan;
- b. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari, dan berbasis ekonomi kerakyatan;
- c. Mengembangkan dan memperkokoh sentra-sentra pengolahan serta pemasaran hasil;
- d. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanggulangan *illegal fishing*;
- e. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan kawasan pesisir.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terdapat 14 IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ukuran keberhasilan, yang tertuang pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 *IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

SEKTOR	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi perikanan budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	a. Jumlah Produksi Budidaya (Ton)
		b. Jumlah Produksi Tangkap (Ton)
		c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)
	2. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)
	3. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	a. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)
	4. Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	a. Jumlah CPIB (unit)
		b. Jumlah CBIB (unit)
		c. Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SKP (unit)
	5. Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	a. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok)
		b. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)
		c. Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)

SEKTOR	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
	6. Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	a. Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) b. Jumlah jenis yang dikonservasi (jenis)
	7. Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir yang rusak	a. Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Ha)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010-2015 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun. Untuk tahun 2016, rencana kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
1	2	3
1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi perikanan budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	a. Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	74.854,47
	b. Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	130.526,1
	c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.311
2. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	104
3. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	a. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	47,09
4. Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	a. Jumlah CPIB (unit)	3
	b. Jumlah CBIB (unit)	45
	c. Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SKP (unit)	2
5. Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	a. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok)	10
	b. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	75
	c. Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	7
6. Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	a. Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	171.679

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
1	2	3
	b. Jumlah jenis yang dikonservasi (jenis)	2
7. Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir yang rusak	a. Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Ha)	2,5

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Tahun 2016 yang telah disepakati. Penetapan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 diimplementasikan ke dalam 6 (enam) program, sebagai berikut :

(1) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut;
- Pendataan Kapal Perikanan;
- Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan;
- Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI;
- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut;
- Pembinaan KUB Penerima PUMP-Perikanan Tangkap;

- h. Peningkatan Keterampilan Usaha Nelayan;
- i. Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap;
- j. Pembuatan Kartu Nelayan;
- k. Pendampingan Penyusunan Data Base KUB.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2016 sebesar Rp. 3.177.334.500,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 968.224.070,-.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

(2) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Tujuan program ini adalah meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
- b. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN);
- c. Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil;
- d. Pembinaan dan Evaluasi Unit Pengolahan Hasil Perikanan;
- e. Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan;
- f. Pameran dan Promosi Produk Perikanan;
- g. Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan;
- h. Operasi Pasar;
- i. Ragam Produk Olahan Bernilai Tambah;
- j. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2016 sebesar Rp. 1.174.493.500,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 615.595.000,-.

(3) Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi WP3K Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Pencadangan kawasan Konservasi Perairan Darat dan Laut;
- c. Penataan Kawasan Wilayah Pesisir.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2016 sebesar Rp. 1.300.000.000,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 788.200.000,-.

(4) Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran wilayah perairan bebas *illegal, unreported*, dan *unregulated (IUU) fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- d. Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2016 sebesar Rp. 758.000.000,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 471.800.000,-.

(5) Program Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan

Program ini bertujuan untuk terlaksananya operasional Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Palangka Raya dengan sasaran terakreditasinya dan terlaksananya pengujian pada LPPMHP Palangka Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemeliharaan Rutin Peralatan Laboratorium;
- b. Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga Analis;
- c. Rehab Kantor LPPMHP-PIL;
- d. Sampling dan Pengujian Kualitas Air;
- e. Sampling dan Pengujian Mutu Produk Hasil Perikanan;
- f. Survelensi di UPI Tradisional;
- g. Konsultasi, Koordinasi Akreditasi UPT. LPPMHP-PIL Palangka Raya;

- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. LPPMHP-PIL Palangka Raya.

Penanggung jawab program tersebut adalah LPPMHP-PIL Palangka Raya dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2016 sebesar Rp. 453.000.000,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 288.000.000,-.

(6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor, serta menyerap tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan dan Sertifikasi CBIB;
- b. Pengembangan Kawasan Budidaya Kolam dan Keramba;
- c. Gerakan Mandiri Pakan;
- d. Pemantauan dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional BBIP Ujung Pandaran;
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional BBIS Talohen;
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional BBUG Kumai;
- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional SPIL Tangkiling;
- i. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil;
- j. Pengembangan Buididaya Ikan Lokal;
- k. Pengembangan dan Peningkatan Mutu UPTD/UPR;

- l. Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lahan Marginal untuk Pengembangan Budidaya Kolam;
- m. Pengembangan Budidaya Ikan di Kawasan Minapolitan;
- n. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
- o. Pemantauan dan Pengendalian Obat dan Bahan Kimia Berbahaya Bagi Budidaya Ikan;
- p. Inventarisasi Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan;
- q. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK);
- r. Pengembangan Kawasan Budidaya Rumput Laut.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Perikanan Budidaya dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2016 sebesar Rp. 4.983.624.500,- dengan perubahan anggaran menjadi Rp. 3.795.283.950,-

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 *Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Produksi perikanan budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	a. Jumlah Produksi Budidaya (Ton) b. Jumlah Produksi Tangkap (Ton) c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	74.854,47 130.526,1 13.311
2.	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	104
3.	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	a. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	47,09
4.	Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, budidaya, dan unit pengolahan	a. Jumlah CPIB (unit) b. Jumlah CBIB (unit) c. Jumlah pengolahan hasil perikanan yang memiliki SKP (unit)	3 45 2
5.	Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	a. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok) b. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) c. Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	10 75 7
6.	Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan	a. Luas kawasan perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) b. Jumlah jenis yang dikonservasi (jenis)	171.679 2
7.	Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir yang rusak	a. Luas kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Ha)	2,5

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2016		KETERANGAN
		SEBELUM (Rp.)	SESUDAH (Rp.)	
1.	Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	3.177.334.500	968.224.070	Perubahan Anggaran / Rasionalisasi
2.	Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.174.493.500	615.595.000	Perubahan Anggaran / Rasionalisasi
3.	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir	1.300.000.000	788.200.000	Perubahan Anggaran / Rasionalisasi
4.	Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	758.000.000	471.800.000	Perubahan Anggaran / Rasionalisasi
5.	Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan	453.000.000	288.000.000	Perubahan Anggaran / Rasionalisasi
6.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	4.983.624.500	3.795.223.930	Perubahan Anggaran / Rasionalisasi
J U M L A H		11.846.452.500	6.927.043.000	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Tahun 2016 sebelum perubahan berjumlah Rp. 11.846.452.500,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp. 7.857.043.000,- atau terjadi pengurangan anggaran sebesar 33,68 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggungjawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian disamping LKIP sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam :

- (a) Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
- (b) Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
- (c) Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
- (d) Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
- (e) Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

4.1 Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan selama tahun 2016, dengan mengacu pada RENSTRA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan

Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari hasil penilaian terhadap empat belas indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, namun demikian jika dilihat dari angka capaian kinerjanya masih terdapat 3 (tiga) indikator dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang tidak mencapai 100% yaitu pada :

- 1) Sasaran : **Terwujudnya Kedaulatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Serta Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan** dengan indikator *Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Menerima Bantuan* tingkat capaiannya sebesar 5 (lima) kelompok dengan kategori cukup (kuning);
- 2) Sasaran : **Terwujudnya Kedaulatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Serta Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan** dengan indikator *Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu* tingkat capaiannya sebesar 5 (lima) kasus dengan kategori cukup (kuning);

- 3) Sasaran : **Meningkatkan Pengelolaan Dan Memperbaiki Wilayah Pesisir Yang Rusak** dengan indikator *Luas Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali* tingkat capaiannya sebesar 80,00 % dengan kategori baik (hijau);

Sedangkan prestasi kinerja tertinggi dicapai pada sasaran : **Peningkatan Sentra-Sentra Unit Perbenihan, Budidaya, dan Unit Pengolahan** dengan indikator **Jumlah CBIB** sebesar **415,56 %** dengan kategori sangat baik (biru).

Data lengkap prestasi capaian kinerja sepuluh indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 selain yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut : (i) Jumlah Produksi Budidaya mencapai 101,40 % (Kategori Sangat Baik); (ii) Jumlah Produksi Tangkap mencapai 109,15 % (Kategori Sangat Baik); (iii) Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan mencapai 180,76 % (Kategori Sangat Baik); (iv) Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) mencapai 102,56 % (Kategori Sangat Baik); (v) Rata-Rata Konsumsi Ikan Masyarakat mencapai 100,00 % (Kategori Baik); (vi) Jumlah CPIB mencapai 300,00 % (Kategori Sangat baik); (vii) Jumlah pengolahan Hasil Perikanan yang Memiliki SKP mencapai 150,00 % (Kategori Sangat Baik); (viii) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku mencapai 100,00 % (Kategori Baik); (ix) Luas Kawasan Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan mencapai 100,00 % (Kategori Baik); (x) Jumlah Jenis yang Dikonsumsi mencapai 100,00 % (Kategori Baik).

Untuk penilaian kinerja keuangan diukur melalui realisasi keuangan, di Tahun 2016 realisasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp. 6.169.144.830,- (89,06%) dari pagu anggaran Rp. 6.927.043.000,- dan lebih rendah apabila dibandingkan dengan

realisasi keuangan pada Tahun 2015 yang realisasinya sebesar 92,84 % atau terjadi penurunan sekitar 3,78 %.

4.2 Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama tahun 2016, yaitu meliputi :

- 1) Perluasan kawasan budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal;
- 2) Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
- 3) Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;
- 4) Masih tingginya serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya keramba di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 5) Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian.
- 6) Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap.
- 7) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
- 8) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- 9) Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 10) Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
- 11) Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- 12) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- 13) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.
- 14) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
- 15) Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

4.3 Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba;
- 2) Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya;
- 3) Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.

- 4) Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah.
- 5) Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral).
- 6) Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda).
- 7) Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat.
- 8) Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada.
- 9) Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

Dengan demikian diharapkan laporan kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 ini dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari LKIP. Tentunya harapan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya secara berkelanjutan dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*).

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas, yang dalam perspektif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapotan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) pembangunan jangka menengah yang disusun secara periode lima tahunan. Pada tahun 2016, sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut diantaranya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Namun, karena adanya peralihan dan transisi kepemimpinan di Provinsi Kalimantan Tengah maka Renstra pada tahun 2016 belum tersusun dan masih menggunakan Renstra 2010 - 2015. Hal inilah yang mengakibatkan capaian kinerja pada tahun 2016 didasarkan pada perjanjian kinerja sebagai acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Disentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani/nelayan;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya hayati;
- e. Pengembangan prasarana perikanan;
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

1.4 Susunan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a) Kepala Dinas, bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perikanan dan kelautan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- b) Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan serta menghimpun bahan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sekretaris membawahi :
 - 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui

pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelestarian ekosistem perairan beserta plasma nutfah dan sumber daya ikan, dan penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi:

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir
 3. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan
- d) Kepala Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan serta melakukan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
1. Kepala Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 3. Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya
- e) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran serta usaha dan investasi. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :
1. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan
 2. Kepala Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
 3. Kepala Seksi Usaha dan Investasi
- f) Kepala Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan prasarana dan sarana penangkapan, teknis tata operasional pelabuhan perikanan, teknis kapal dan alat tangkap perikanan, teknis

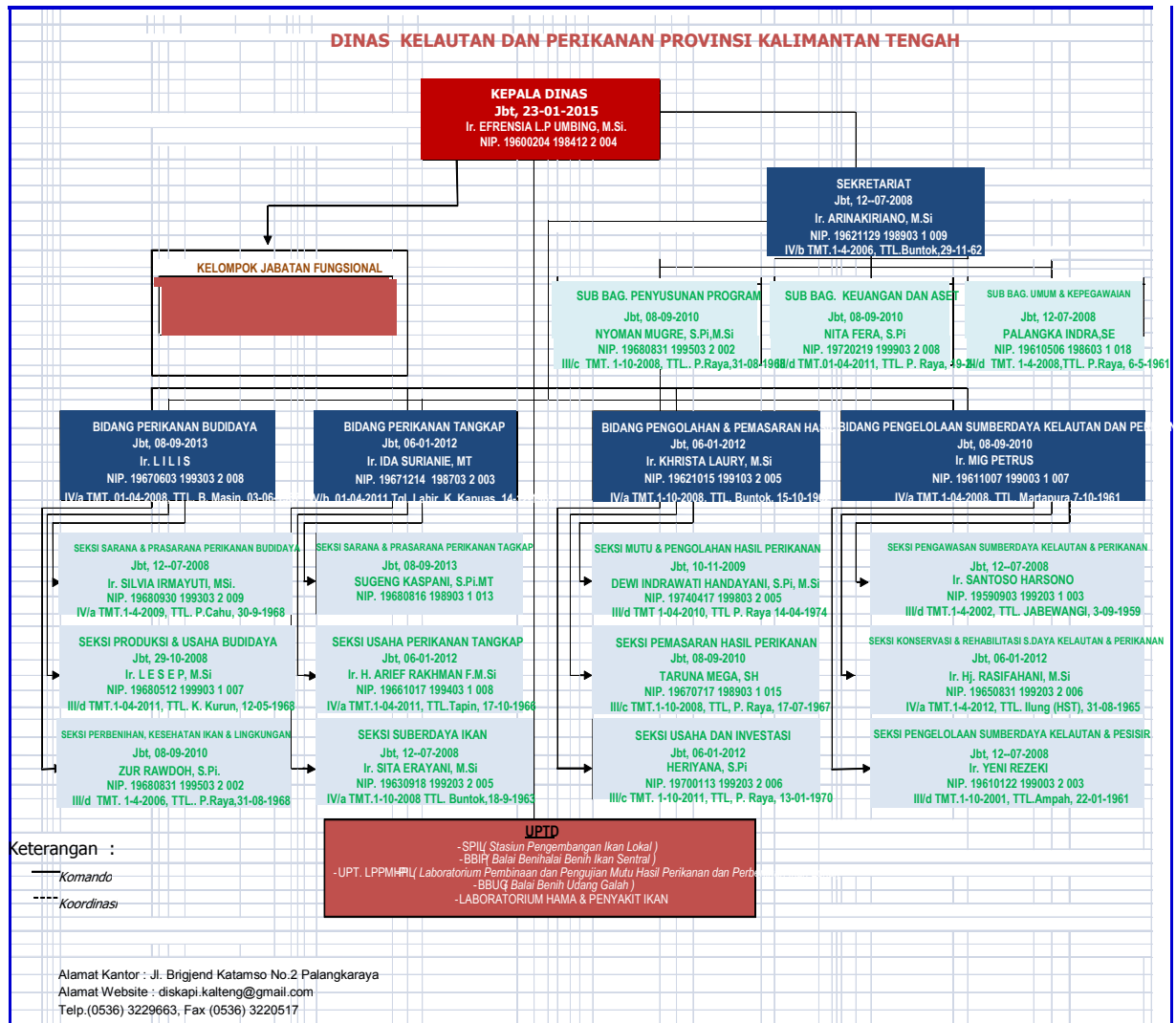
perizinan usaha penangkapan, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha penangkapan, melakukan pembinaan tata pemanfaatan perikanan perairan pedalaman, perairan payau dan perairan laut serta pemanfaatan data dan potensi

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

1. Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap
 2. Kepala Seksi Sumber Daya Ikan
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- g) Jabatan Fungsional
- h) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

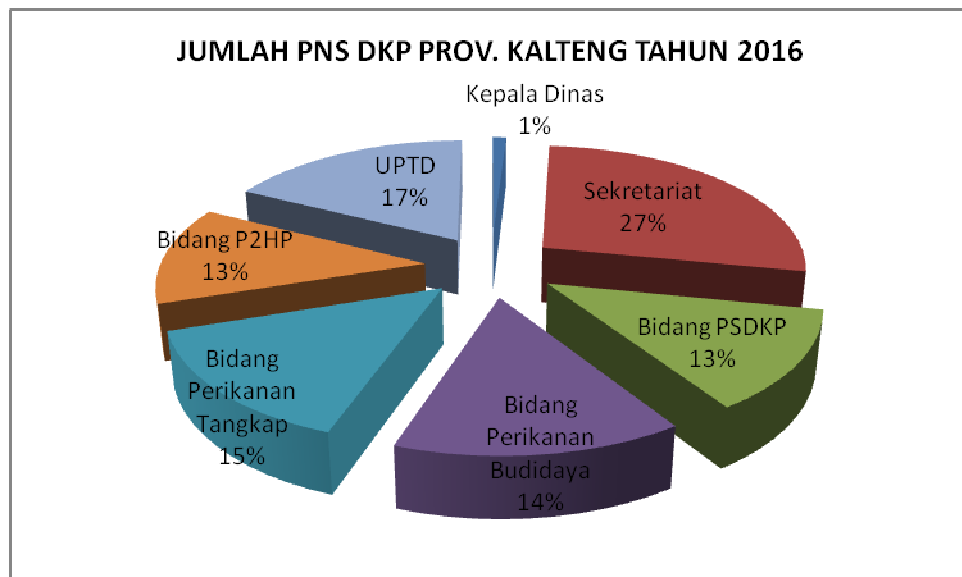
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.5 Keadaan Personil dan Kepegawaian

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 mencapai 103 Orang dengan rincian sebagai berikut : Kepala Dinas 1 Orang,

Sekretariat 28 Orang, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 13 Orang, Bidang Perikanan Budidaya 15 Orang, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 13 Orang, Bidang Perikanan Tangkap 15 Orang, dan UPTD 18 Orang.

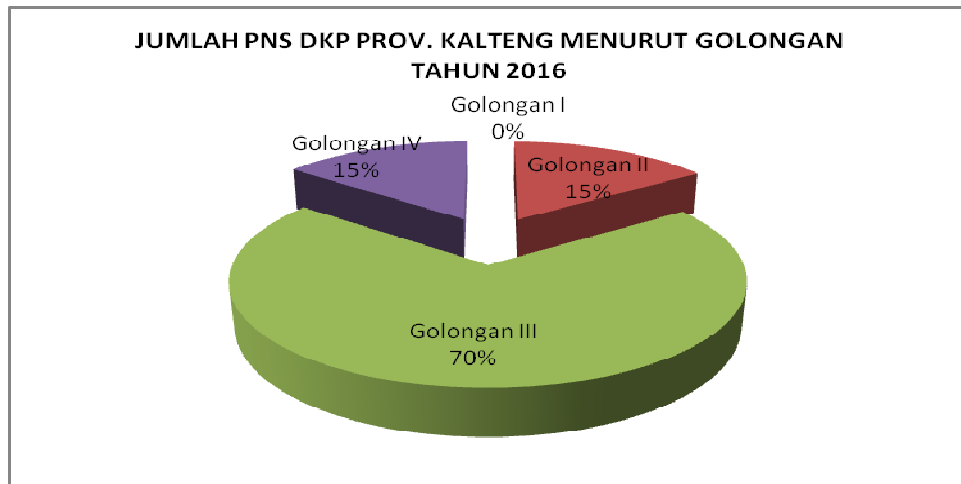


Grafik 1.1 *Jumlah PNS DKP Provinsi Kalimantan Tengah*

- b) Jika dilihat dari Gambar 1 di atas, jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak terdapat di Sekretariat sekitar 27 % dari total jumlah pegawai DKP Provinsi Kalimantan Tengah.

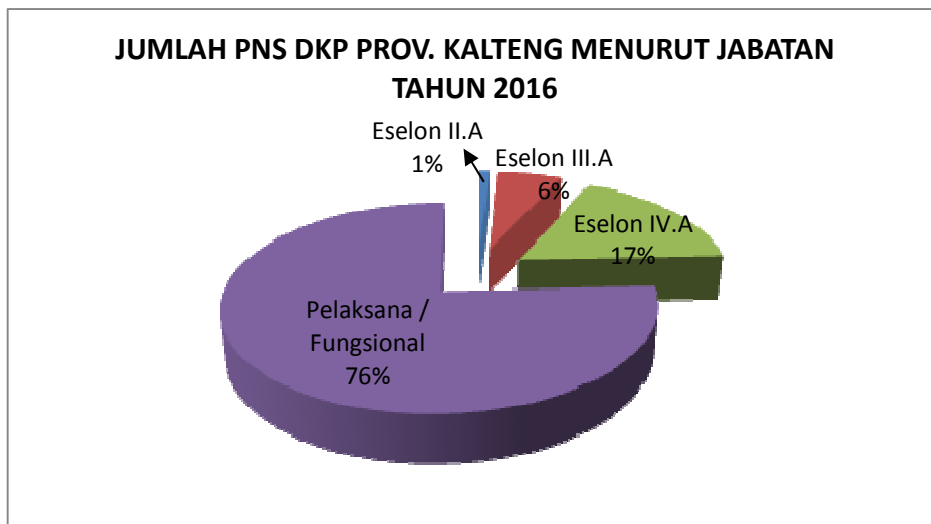
c) Jumlah PNS yang ada di dinas sebanyak 83 % sedangkan yang ada di UPTD sebanyak 17 %

- d) Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV sebanyak 15 Orang, Golongan III sebanyak 72 Orang, dan Golongan II sebanyak 16 Orang.



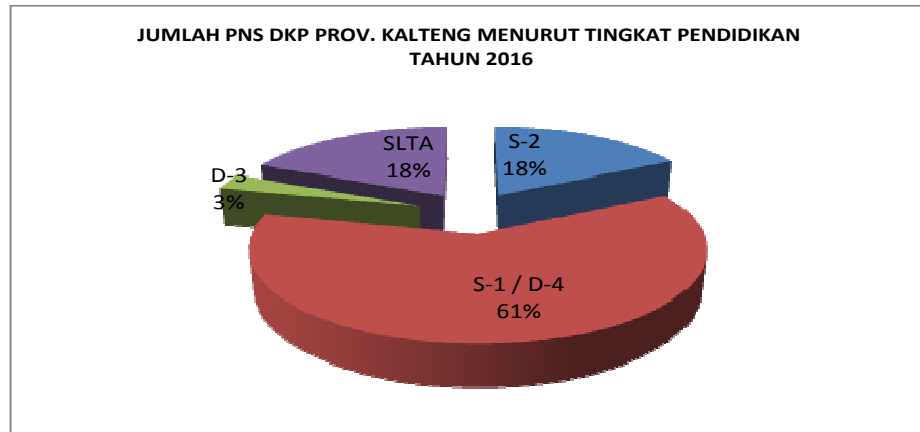
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- e) Dilihat pada Gambar 2 di atas menurut golongannya PNS DKP Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak pada Golongan III mencapai 70%, sedangkan jumlah terkecil pada Golongan II dan Golongan IV sebesar 15 %, dan Golongan I sebesar 0 %.
- f) Jumlah PNS menurut jabatan : jabatan Eselon II sebanyak 1 Orang, jabatan Eselon III sebanyak 6 Orang, jabatan Eselon IV sebanyak 18 Orang, dan Pelaksana sebanyak 78 Orang.



Grafik 1.3 Jumlah PNS DKP Prov. Kalteng Menurut Jabatan

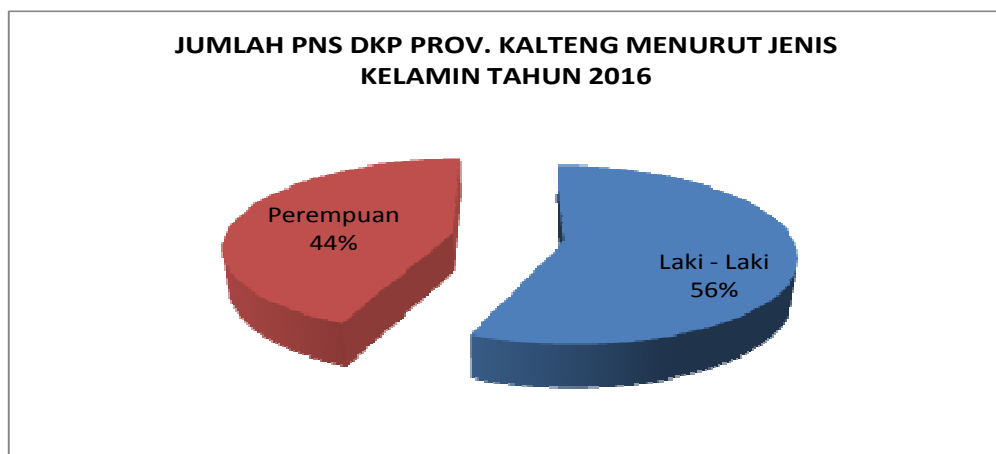
- g) Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan : S2 sebanyak 18 Orang, S1/D4 sebanyak 63 Orang, D3 sebanyak 3 Orang, dan SLTA/Sederajat sebanyak 19 Orang.



Grafik 1.4 *Jumlah PNS DKP Prov. Kalteng Menurut Pendidikan*

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- h) Menurut tingkat pendidikannya, PNS DKP Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak dengan tingkat pendidikan S1 mencapai 61 %, sedangkan yang berpendidikan D3 yang paling sedikit yaitu 3% (Gambar 4).
- i) Jumlah PNS menurut jenis kelamin : laki-laki sebanyak 58 Orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 45 Orang (Gambar 5).



Grafik 1.5 *Jumlah PNS DKP Prov. Kalteng Menurut Jenis Kelamin*

1.6 Sistematika Penyajian LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016. Capaian Kinerja Tahun 2016 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut :

- a) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan personil dan kepegawain;
- c) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
- d) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016;
- e) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
- f) **Lampiran**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TENGAH**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Brigjen. Katamso No. 2
Telp. 0536 3229663, Fax. 0536 3220517
Palangka Raya 73112
2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016”** ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa LKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.

Palangka Raya, Maret 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. EFRENSIA L.P. UMBING, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600204 198412 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix

BAB I

PENDAHULUAN	1
--------------------------	----------

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.4 Susunan Struktur Organisasi.....	3
1.5 Keadaan Personil dan Kepegawaian	6
1.6 Sistematika Penyajian LAPKIN	9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA	11
----------------------------------	-----------

2.1 Rencana Strategis Tahun 2010-2015	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015	17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
-----------------------------------	-----------

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja	24
3.2 Evaluasi Kinerja.....	28
3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	60
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	65

BAB IV

PENUTUP	74
----------------------	-----------

4.1 Capaian Kinerja IKU	74
4.2 Permasalahan	76
4.3 Upaya Tindak Lanjut	81

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	16
Tabel 2.2	<i>Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	17
Tabel 2.3	<i>Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	22
Tabel 3.1	<i>Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	27
Tabel 3.2	<i>Perbandingan antara Target Renstra dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015</i>	29
Tabel 3.3	<i>Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2015</i>	30
Tabel 3.4	<i>Jenis Pelanggaran/Kasus Bidang Perikanan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	31
Tabel 3.5	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2015 Sasaran Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	32
Tabel 3.6	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RENSTRA Akhir Tahun 2015 dari Tahun 2011-2015 Sasaran Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2015</i>	33
Tabel 3.7	<i>Perbandingan antara Target RENSTRA dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Sumber Daya Laut dan Pesisir oleh Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	34
Tabel 3.8	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2015 Sasaran Jumlah Desa Kawasan Pesisir Yang Diberdayakan Tahun 2015</i>	36
Tabel 3.9	<i>Perbandingan Target RENSTRA Akhir Tahun 2015 terhadap Capaian Kinerja Indikator Jumlah Desa Kawasan Pesisir Yang Diberdayakan dari Tahun 2011- 2015</i>	37
Tabel 3.10	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	38

Tabel 3.11	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2013-2015 Sasaran Jumlah Tenaga Kerja pada masing-masing Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	39
Tabel 3.12	<i>Perbandingan antara Target RENSTRA dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.....</i>	40
Tabel 3.13	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2015 Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	41
Tabel 3.14	<i>Perbandingan Target RENSTRA Akhir tahun 2015 terhadap Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2011- 2015.....</i>	41
Tabel 3.15	<i>Perbandingan antara Target RENSTRA terhadap Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Benih Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.....</i>	43
Tabel 3.16	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Jumlah Produksi Benih Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2011 - Tahun 2015..</i>	43
Tabel 3.17	<i>Perbandingan Target RENSTRA Akhir 2015 terhadap Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produksi Benih Ikan dari Tahun 2011-2015.....</i>	44
Tabel 3.18	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya PAD Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	46
Tabel 3.19	<i>Sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	46
Tabel 3.20	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Hasil Tangkapan dalam Setiap Upaya Penangkapan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.....</i>	47
Tabel 3.21	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2015 Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015</i>	48
Tabel 3.22	<i>Perbandingan Target RENSTRA Akhir Tahun 2015 terhadap Capaian Kinerja dari tahun 2011-2015 Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015.....</i>	48
Tabel 3.23	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.....</i>	50
Tabel 3.24	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2015 Indikator Jumlah Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	51

Tabel 3.25	<i>Perbandingan Target RENSTRA Akhir 2015 terhadap Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015</i>	51
Tabel 3.26	<i>Perbandingan antara Target Renstra dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015</i>	53
Tabel 3.27	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2015 pada Indikator Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan</i>	53
Tabel 3.28	<i>Perbandingan Target Renstra Akhir Tahun 2015 terhadap Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2015 Indikator Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan</i>	54
Tabel 3.29	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pencapaian Sasaran Tersedianya LPPMHP yang Terakreditasi Tahun 2015</i>	55
Tabel 3.30	<i>Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya LPPMHP yang Terakreditasi Tahun 2015</i>	56
Tabel 3.31	<i>Perbandingan Indikator Pencapaian dari Target terhadap Realisasi Tahun 2015.....</i>	62
Tabel 3.32	<i>Kegiatan Yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama-sama Efisien Dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2015</i>	63
Tabel 3.33	<i>Kegiatan Yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien Dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2015</i>	63
Tabel 3.34	<i>Indikator Realisasi Capaian Sasaran dari Tahun 2011-2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	64
Tabel 3.35	<i>Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014.....</i>	65
Tabel 3.36	<i>Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015..</i>	67

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	6
------------	---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	<i>Jumlah PNS DKP Provinsi Kalimantan Tengah</i>	7
Grafik 1.2	<i>Jumlah PNS Menurut Golongan</i>	7
Grafik 1.3	<i>Jumlah PNS Menurut Jabatan</i>	8
Grafik 1.4	<i>Jumlah PNS Menurut Pendidikan</i>	8
Grafik 1.5	<i>Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin</i>	9
Grafik 3.1	<i>Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian Tujuan Misi dan Visi Tahun 2015</i>	61
Grafik 3.2	<i>Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2015</i>	63
Grafik 3.3	<i>Perkembangan Daya Serap Anggaran Belanja Per Triwulan Tahun 2015</i>	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Renstra-SKPD Tahun 2010-2015 (Formulir RS)
- Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT)
- Lampiran 3 : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2015
- Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Tahun 2015 (Formulir PK)

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :
(a) keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
(b) keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Aras dan tujuan yang ingin dicapai atau dilaksanakan dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010-2015, yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap untuk peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan;
- b. Meningkat dan terpenuhinya serta kebutuhan konsumsi ikan masyarakat;
- c. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan sehingga dapat bersaing, baik dipasar dalam negeri maupun internasional;
- d. Terpenuhinya kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya, baik kualitas maupun kuantitas;
- e. Terjaga dan pulihnya sumber daya perairan laut dan sumber daya perairan umum daratan;
- f. Meningkatnya usaha dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir;
- g. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan;
- h. Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dan PAD.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2016, antara lain meliputi :

- a. Meningkatnya volume produksi perikanan tangkap menjadi 130.526,1 ton, produksi perikanan budidaya menjadi 74.854,47 ton, jumlah produk olahan hasil perikanan menjadi 13.311 ton;
- b. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 104;
- c. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat menjadi 47,09 kg per kapita per tahun;
- d. Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan menjadi 3 unit CPIB, unit budidaya menjadi 45 unit CBIB, dan unit pengolahan yang memiliki SKP menjadi 2 unit pengolahan hasil perikanan;
- e. Terwujudnya kedaulatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif melalui jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan menjadi 10 kelompok, persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi 75 %, dan jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu menjadi 7 kasus;
- f. Meningkatkan kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan dengan luas kawasan 171.679 hektar dengan jumlah jenis yang dikonservasi menjadi 2 jenis.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan memperbaiki wilayah pesisir dan rusak agar pulih kembali menjadi 2,5 hektar.

Capaian target empat belas IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2016, secara singkat diuraikan sebagai berikut :

Dari hasil penilaian terhadap empat belas indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, namun demikian jika dilihat dari angka capaian kinerjanya masih terdapat 3 (tiga) indikator dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang tidak mencapai 100% yaitu pada :

- a) Sasaran : **Terwujudnya Kedaulatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Serta Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan** dengan indikator *Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Menerima Bantuan* tingkat capaiannya sebesar 5 (lima) kelompok dengan kategori cukup (kuning);
- b) Sasaran : **Terwujudnya Kedaulatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Serta Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan** dengan indikator *Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu* tingkat capaiannya sebesar 5 (lima) kasus dengan kategori cukup (kuning);

- c) Sasaran : **Meningkatkan Pengelolaan Dan Memperbaiki Wilayah Pesisir Yang Rusak** dengan indikator *Luas Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali* tingkat capaiannya sebesar 80,00 % dengan kategori baik (hijau);

Sedangkan prestasi kinerja tertinggi dicapai pada sasaran : **Peningkatan Sentra-Sentra Unit Perbenihan, Budidaya, dan Unit Pengolahan** dengan indikator **Jumlah CBIB** sebesar **415,56 %** dengan kategori sangat baik (biru).

Data lengkap prestasi capaian kinerja sepuluh indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 selain yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut : (i) Jumlah Produksi Budidaya mencapai 101,40 % (Kategori Sangat Baik); (ii) Jumlah Produksi Tangkap mencapai 109,15 % (Kategori Sangat Baik); (iii) Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan mencapai 180,76 % (Kategori Sangat Baik); (iv) Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) mencapai 102,56 % (Kategori Sangat Baik); (v) Rata-Rata Konsumsi Ikan Masyarakat mencapai 100,00 % (Kategori Baik); (vi) Jumlah CPIB mencapai 300,00 % (Kategori Sangat baik); (vii) Jumlah pengolahan Hasil Perikanan yang Memiliki SKP mencapai 100,00 % (Kategori Sangat Baik); (viii) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku mencapai 100,00 % (Kategori Baik); (ix) Luas Kawasan Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan mencapai 100,00 % (Kategori Baik); (x) Jumlah Jenis yang Dikonservasi mencapai 100,00 % (Kategori Baik).

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

B. Kinerja Keuangan

Untuk penilaian kinerja keuangan diukur melalui realisasi keuangan, di Tahun 2016 realisasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp. 6.169.144.830,- (89,06%) dari pagu anggaran Rp. 6.927.043.000,- dan lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi keuangan pada Tahun 2015 yang realisasinya sebesar 92,84 % atau terjadi penurunan sekitar 3,78 %.

C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama tahun 2016, yaitu meliputi :

- 1) Perluasan kawasan budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal;
- 2) Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
- 3) Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;
- 4) Masih tingginya serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya keramba di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 5) Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian.
- 6) Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap.
- 7) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
- 8) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

- 9) Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan.
- 10) Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
- 11) Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- 12) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- 13) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.
- 14) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
- 15) Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba;
- 2) Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya;
- 3) Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.
- 4) Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah.
- 5) Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral).
- 6) Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda).
- 7) Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat.
- 8) Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada.
- 9) Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

**PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016**

Kabupaten	Produksi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah	75.954,85	17.493,63	19.232,05	19.445,49	19.783,68
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	5.118,03	1.239,34	1.290,30	1.292,90	1.295,49
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	5.484,88	1.328,06	1.394,46	1.354,62	1.407,74
KABUPATEN KAPUAS	16.284,54	3.765,89	4.142,48	4.183,90	4.192,27
KABUPATEN BARITO SELATAN	7.673,07	1.770,80	1.947,88	1.967,36	1.987,03
KABUPATEN BARITO UTARA	4.569,37	1.099,41	1.145,16	1.156,62	1.168,18
KABUPATEN KATINGAN	2.673,99	623,51	654,69	680,87	714,92
KABUPATEN SUKAMARA	1.307,21	321,94	325,16	328,41	331,70
KABUPATEN LAMANDAU	1.549,65	381,65	385,47	389,32	393,21
KABUPATEN SERUYAN	12.514,32	2.664,48	3.250,67	3.283,17	3.316,00
KABUPATEN PULANG PISAU	3.995,09	919,05	979,65	1.024,66	1.071,73
KABUPATEN GUNUNG MAS	2.187,84	404,00	571,56	577,28	635,00
KABUPATEN BARITO TIMUR	1.193,73	295,50	293,50	299,37	305,36
KABUPATEN MURUNG RAYA	2.459,20	565,55	597,19	630,59	665,87
KOTA PALANGKARAYA	8.943,93	2.114,45	2.253,88	2.276,42	2.299,18
Jumlah	75.954,85	17.493,63	36.725,68	56.171,17	75.954,85

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya, DKP Kalteng

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016

No.	Kabupaten/Kota	Perairan Umum				Produksi PUD	Perairan Laut				Produksi PL	TOTAL PRODUKSI
		Kwartal I	Kwartal II	Kwartal III	Kwartal IV		Kwartal I	Kwartal II	Kwartal III	Kwartal IV		
1.	Kotawaringin Barat	1.233,7	1.234,7	427,4	59,1	2.954,9	3.258,3	2.439,6	1.737,4	2.206,0	9.641,3	12.596,2
2.	Kotawaringin Timur	8,4	9,4	4,9	149,2	171,9	4.118,3	2.728,6	780,0	1.340,0	8.966,9	9.138,8
3.	Kapuas	826,5	1.142,2	1.339,7	1.436,7	4.745,1	1.747,2	2.207,0	2.627,8	3.482,3	10.064,3	14.809,4
4.	Sukamara	111,9	113,5	2.203,0	262,9	2.691,3	1.006,2	531,7	257,4	1.129,0	2.924,3	5.615,6
5.	Seruyan	191,6	145,0	167,6	154,9	659,1	25.471,4	12.532,0	4.019,1	23.162,0	65.184,5	65.843,6
6.	Katingan	356,2	379,4	523,7	805,1	2.064,4	861,6	573,3	410,6	675,6	2.521,1	4.585,5
7.	Pulang Pisau	754,6	898,5	786,8	614,3	3.054,2	5.419,6	4.061,7	2.647,2	3.931,8	16.060,3	19.114,5
8.	Barito Selatan	1.228,0	474,8	442,3	2.407,1	4.552,2	-	-	-	-	-	4.552,2
9.	Barito Utara	250,1	286,3	282,1	311,1	1.129,6	-	-	-	-	-	1.129,6
10.	Lamandau	358,3	285,4	194,8	281,4	1.119,9	-	-	-	-	-	1.119,9
11.	Gunung Mas	86,4	70,1	62,5	162,2	381,2	-	-	-	-	-	381,2
12.	Barito Timur	143,5	231,5	248,0	264,8	887,8	-	-	-	-	-	887,8
13.	Murung Raya	52,2	52,3	52,2	255,3	412,0	-	-	-	-	-	412,0
14.	Palangka Raya	493,5	562,4	634,1	590,3	2.280,3	-	-	-	-	-	2.280,3
	Kalimantan Tengah	6.094,9	5.885,5	7.369,1	7.754,4	27.103,9	41.882,6	25.073,9	12.479,5	35.926,7	115.362,7	142.466,6

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap, DKP Kalteng

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN	
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
TAHUN 2016	
TRIWULAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)
1	1.356,00
2	10.490,20
3	7.140,00
4	5.075,41
T O T A L	24.061,61

Sumber : Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, DKP Kalteng

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Laporan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Perorangan/Perusahaan	Nama Kapal	Domisili	Nomor SIUP/SIPI/SIKPI/Tanda Pendaftaran Kapal/ANDON	Tanda Selar	GT	Tanda Pengenal Kapal	Pelabuhan Pangkalan	Pelabuhan Muat/Singgah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ROBY GUNAWAN	BINTANG TERANG	JL. PASIR PUTIH RT.10 SUNGAI KAPITAN, KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT	570/10 /SIUP/II/BPMDP-2016	GT.22.No.90/llic	22	-	PPI KUMAI	-
2	ATU/KUB USAHA MAKMUR	TENGGIRI 04	JL. KAMPUNG PASAR, CEMANTAN, KEC.KAHAYAN KUALA, PULANG PISAU	570/11/SIUP/III/BPMDP-2016	GT.10.No.3717/lia	10	-	PPI BAH Aur	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAH Aur, PPI BATANJUNG
3	DIDI YANSYAH/KUB LAUT SEJAHTERA	TENGGIRI 06	JL. A.I.S. NASUTION RT/RW.05/01, SUNGAI UNDANG, KEC.SERUYAN HILIR, SERUYAN	570/12/SIUP/III/BPMDP-2016	GT.10.No.3719/lia	10	-	PPI KUALA PEMBUANG	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAH Aur, PPI BATANJUNG
4	SARBANI/KUB HARAPAN KITA	TENGGIRI 01	DESA PEMATANG RT.01, KEC.KAPUAS KUALA, KAPUAS	570/13/SIUP/III/BPMDP-2016	GT.10.No.3714/lia	10	-	PPI BATANJUNG	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAH Aur, PPI BATANJUNG
5	KURDI/KUB USAHA BERSAMA	MINA MARITIM 023	JL. PANGLI MA UTAR RT/RW.08/02 SUNGAI BAKAU, KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT	570/14/SIUP/V/BPMDP-2016	GT.29.No.509/LLq	29	-	PPI KUMAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAH Aur, PPI BATANJUNG
6	ABDUL BAR	SINAR BERLIAN	JL. H.M.IDRIS RT.01 KUMAI HULU, KEC.KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT	570/15/SIUP/V/BPMDP-2016	GT.27.No.342/Hhe	27	-	PPI KUMAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAH Aur, PPI BATANJUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Nama Perorangan/Perusahaan	Nama Kapal	Domisili	Nomor SIUP/SIPI/SIKPI/Tanda Pendaftaran Kapal/ANDON	Tanda Selar	GT	Tanda Pengenal Kapal	Pelabuhan Pangkalan	Pelabuhan Muat/Singgah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ABDUL BAR	SINAR SURYA ABADI-V	JL. H.M.IDRIS RT.01 KUMAI HULU, KEC.KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT	570/15/SIUP/V/BPMDP-2016	GT.24.No.355/Hhe	24	-	PPI KUMAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHATUR, PPI BATANJUNG
8	THABRANI IMBRAN/KUB BERKAT USAHA BERSAMA	TENGGIRI 03	JL. DEPOS NO. 17-18 RT/RW.15/05 KEL.BASIRIH HILIR, KEC.MENTAYA HILIR SELATAN, KOTAWARINGIN TIMUR	570/16/SIUP/VI/BPMDP-2016	GT.10.No.3716/lia	10	-	PPI UJUNG PANDARAN	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHATUR, PPI BATANJUNG
9	SAMIN	SUKSES	JL. H.HASANUDIN RT.04,KEL.KUALA JELAI,KEC.JELAI,KAB.SUKAMARA	570/17/SIUP/X/BPMDP-2016	GT.29.No.741/PPj	29	-	PPI KUALA JELAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHATUR, PPI BATANJUNG
10	ATU/KUB USAHA MAKMUR	TENGGIRI 04	JL. KAMPUNG PASAR, CEMANTAN, KEC.KAHAYAN KUALA, PULANG PISAU	570/01/SIPI/III/BPMDP-2016	GT.10.No.3717/lia	10	-	PPI BAHATUR	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHATUR, PPI BATANJUNG
11	DIDI YANSYAH/KUB LAUT SEJAHTERA	TENGGIRI 06	JL. A.I.S. NASUTION RT/RW.05/01, SUNGAI UNDANG, KEC.SERUYAN HILIR, SERUYAN	570/02/SIPI/IV/BPMDP-2016	GT.10.No.3719/lia	10	-	PPI KUALA PEMBUANG	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHATUR, PPI BATANJUNG
12	SARBANI/KUB HARAPAN KITA	TENGGIRI 01	DESA PEMATANG RT.01, KEC.KAPUAS KUALA, KAPUAS	570/03/SIPI/IV/BPMDP-2016	GT.10.No.3714/lia	10	-	PPI BATANJUNG	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHATUR, PPI BATANJUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Nama Perorangan/Perusahaan	Nama Kapal	Domisili	Nomor SIUP/SIPI/SIKPI/Tanda Pendaftaran Kapal/ANDON	Tanda Selar	GT	Tanda Pengenal Kapal	Pelabuhan Pangkalan	Pelabuhan Muat/Singhah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	KURDI/KUB USAHA BERSAMA	MINA MARITIM 023	JL. PANGLI MA UTAR RT/RW.08/02 SUNGAI BAKAU, KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT	570/04/SIPI/V/BPMDP-2016	GT.29.No.509/LLq	29	-	PPI KUMAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHAU, PPI BATANJUNG
14	THABRANI IMBRAN/KUB BERKAT USAHA BERSAMA	TENGGIRI 03	JL. DEPOS NO. 17-18 RT/RW.15/05 KEL.BASIRIH HILIR, KEC.MENTAYA HILIR SELATAN, KOTAWARINGIN TIMUR	570/05/SIPI/VI/BPMDP-2016	GT.10.No.3716/IIa	10	-	PPI UJUNG PANDARAN	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHAU, PPI BATANJUNG
15	ABDUL BAR	SINAR BERLIAN	JL. H.M.IDRIS RT.01 KUMAI HULU, KEC.KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT	570/06/SIPI/VI/BPMDP-2016	GT.27.No.342/Hhe	27	-	PPI KUMAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHAU, PPI BATANJUNG
16	ABDUL BAR	SINAR SURYA ABADI-V	JL. H.M.IDRIS RT.01 KUMAI HULU, KEC.KUMAI, KOTAWARINGIN BARAT	570/07/SIPI/VI/BPMDP-2016	GT.24.No.355/Hhe	24	-	PPI KUMAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHAU, PPI BATANJUNG
17	SAMIN	SUKSES	JL. H.HASANUDIN RT.04,KEL.KUALA JELAI,KEC.JELAI,KAB.SUKAMARA	570/08/SIPI/XI/BPMDP-2016	GT.29.No.741/PPj	29	-	PPI KUALA JELAI	PPI KUMAI, PPI KUALA JELAI, PPI UJUNG PANDARAN, PPI KUALA PEMBUANG, PPI BAHAU, PPI BATANJUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Palangka Raya, September 2016

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan

Provinsi Kalimantan Tengah,

H. MUGENI, SH., MH

NIP. 19590704 198903 1 009

REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PER 31 DESEMBER 2016
UNIT ORGANISASI : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	Jenis yang dihitung	Jumlah/ Orang	Laki - Laki	Perempuan	Keterangan
1	Jumlah Pegawai :	103	58	45	
	A. PNS	101	58	45	
	B. CPNS	0	0	0	
2	Eselon :	25	12	13	
	A. 1.b	0	0		
	B. II.a	1	1	0	
	C. II.b	0	0	0	
	D. III.a	6	2	4	
	E. III.b	0	0	0	
	F. IV.a	18	9	9	
	G. IV.b				
3	Pegawai Fungsional	78	47	31	
4	Golongan/ Pangkat :	103	59	44	
	A. IV/e	0	0	0	
	B. IV/d	1	1	0	
	C. IV/c	0	0	0	
	D. IV/b	6	2	4	
	E. IV/a	8	4	4	
	F. III/d	10	5	5	
	G. III/c	10	4	6	
	H. III/b	41	23	18	
	I. III/a	11	8	3	
	J. II/d	1	0	1	
	K. II/c	7	4	3	
	L. II/b	5	5	0	
	M. II/a	3	3	0	
	N. I/d	0	0	0	
	O. I/c	0	0	0	
	P. I/b	0	0	0	
	Q. I/a	0	0	0	
5	Pendidikan	103	58	45	
	A. S3				
	B. S2	18	8	10	
	C. S1	52	25	27	
	D. D4	11	10	1	
	E. D3	3	1	2	
	F. D2	0	0	0	
	G. D1	0	0	0	
	H. SMA/ sederajat	19	14	5	
	I. SMP/ Sederajat	0	0	0	
	J. SD	0	0	0	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



**DAFTAR KABUPATEN PENERIMA PERLENGKAPAN POKMASWAS
PROV. KALTENG TAHUN 2016**

No.	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume	Kabupaten Penerima	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I. Pengadaaan Perlengkapan POKMASWAS					
1.	Hp Android Berkamera "Samsung J1 Ace"	Spesifikasi : - LTE Cat 4 - 1,2 GHz Quad Core Processor - 109,2 mm (4,3") WVGA Samoled - 5MP AF + 2 MP - 8 GB Memory	20 Unit	- Kotim - Pulang Pisau - Kapuas - Kobar - Seruyan	Masing2 Kab. Menerima 4 Unit
2.	Senter Setrum Penerangan " Bai Chuan Swat Flashlight"	Spesifikasi : - SWAT OEM 15000 watt – 99000 watt - Tipe Battery : 1 x 18650 Lithium - Body Senter : Alumunium - Charging Ulang : Ya - Metode Charge : di dalam senter	20 Unit	- Kotim - Pulang Pisau - Kapuas - Kobar - Seruyan	Masing2 Kab. Menerima 4 Unit
3.	Rompi Pengawas	Spesifikasi : - Bahan Parasut - Pada bagian belakang (Punggung) dipasang reflektor / Scotlight "POKMASWAS SDKP KALTENG"	20 Unit	- Kotim - Pulang Pisau - Kapuas - Kobar - Seruyan	Masing2 Kab. Menerima 4 Unit

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)

Tahun	Bulan	NTP Perikanan
2016	Januari	105,83
	Februari	106,65
	Maret	105,97
	April	107,59
	Mei	107,26
	Juni	106,77
	Juli	106,51
	Agustus	106,51
	September	106,52
	Oktober	106,56
	Nopember	106,97
	Desember	106,81
Total 2016		1.279,95
Rata-Rata 2016		106,66

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN